



**AKSI PERUBAHAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

**PENGUATAN KOLABORASI DINAS DENGAN KOMUNITAS
DI SUMATERA SELATAN DALAM MENINGKATKAN SISTEM
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK**

Oleh:

**BARIYANTI ARTHINI, S.E., M.Si
NIP. 198112062006042016**

NDH: 02

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
TAHUN 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN
AKSI PERUBAHAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

**PENGUATAN KOLABORASI DINAS DENGAN KOMUNITAS
DI SUMATERA SELATAN DALAM MENINGKATKAN SISTEM
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK**

Oleh:

**BARIYANTI ARTHINI, S.E., M.Si
NIP. 198112062006042016**

NDH: 02

Telah disetujui untuk diseminarkan pada:

Hari/Tanggal :
Tempat : **BPSDMD PROVINSI SUMATERA SELATAN**

COACH,

MENTOR,

H.SENTOT SUPRIYADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 1966092111989011001

Hj. MUSHARMINA., S.AP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 197306161992032001

Menyetujui :
An. KEPALA BPSDM PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJERIAL,

TRI HARTATI, S.E., M.Si.
Pembina / IV a
NIP. 19721219 2006042006

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
PENGUATAN KOLABORASI DINAS DENGAN KOMUNITAS
DI SUMATERA SELATAN DALAM MENINGKATKAN SISTEM
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK

Oleh:

BARIYANTI ARTHINI, S.E., M.Si
NIP. 198112062006042016

NDH: 02

Telah disetujui untuk diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : **Juli 2025**

Tempat : **BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan**

COACH,

PENGUJI,

H.SENTOT SUPRIYADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 1966092111989011001

ZURAIDA ROYANI, S.E., M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770416201012008

Mengesahkan

Kepala BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan

Prof. Dr. H. M. EDWAR JULIARTHA, S.Sos., M.M
Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 197507071997031003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Aksi Perubahan yang berjudul “Penguatan Kolaborasi Dinas dengan Komunitas di Sumatera Selatan dalam meningkatkan Sistem Perlindungan terhadap Anak ”.

Dalam kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung, sehingga Aksi Perubahan ini dapat diselesaikan dengan baik, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Edwar Juliartha selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan beserta jajarannya yang telah menyelenggarakan Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP);
2. Ibu Fitriana.,S.Sos.,M.Si selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan;
3. Ibu Hj. Musharmina.,S.AP selaku kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah bersedia menjadi mentor;
4. Bapak H. Sentot Supriyadi. S.Sos., M.Si yang membimbing dan mengarahkan dalam pengerjaan laporan aksi perubahan ini;
5. Widyaiswara yang telah membimbing dan memberikan materi Diklat PKP;
6. Tim panitia penyelenggaran Diklat PKP Angkatan I Tahun 2025;
7. Rekan-rekan peserta Diklat PKP Angkatan.I Provinsi Sumsel tahun 2025;
8. Semua pihak yang turut membantu menyelesaikan rancangan ini dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan aksi perubahan ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kritik dan saran sangat diperlukan agar aksi perubahan menjadi lebih baik. Semoga aksi perubahan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Palembang, Juli 2025

Bariyanti Arthini,S.E.,M.Si

NDH. 02

DAFTAR ISI

JUDUL AKSI PERUBAHAN	I
LEMBAR PERSETUJUAN	II
LEMBAR PENGESAHAN	III
KATA PENGANTAR.....	IVV
DAFTAR ISI	V
DAFTAR TABEL.....	VII
DAFTAR GAMBAR	VIII
RINGKASAN EKSEKUTIF	IX
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	4
C. Manfaat Aksi Perubahan	5
D. Ruang Lingkup Aksi Perubahan	6
E. Analisa Masalah Pelayanan/ Unit Kerja.....	7
BAB II.....	24
DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN	24
A. Membangun Integritas Kinerja Pelayanan.....	24
B. Pengelolaan Pelayanan (Pemanfaatan Teknologi Informasi)	28
C. Pengelolaan Tim Efektif	29

BAB III DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN	30
A. Capaian dan Perbaikan Kinerja Pelayanan	30
B. Manfaat Aksi Perubahan	43
C. Implementasi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan	44
BAB IV KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN	45
BAB V KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN	47
BAB VI DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN	52
A. Penerapan Stategi Komunikasi	52
B. Keberhasilan mendapat dukungan Aksi Perubahan	66
BAB VII PENGEMBANGAN POTENSI DIRI	55
Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Strategi Pengembangan	55
BAB VIII PENUTUP	58
A. KESIMPULAN	59
B. Rekomendasi.....	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Identifikasi Masalah dan Analisis	8
Tabel 1.2 Tahapan Kegiatan Rancangan Kegiatan Aksi Perubahan	12
Tabel 1.3 Jadwal Kegiatan Aksi Perubahan	14
Tabel 1.4 Stakeholder Berdasarkan Pola Hubungan	15
Tabel 1.5 Komunikasi dengan Stakeholder	16
Tabel 1.6 Susunan Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan	17
Tabel 1.7. Pengembangan Kompetensi	19
Tabel 1.8. Rekap Nilai Akhir Perilaku Peserta	20
Tabel 1.9 Rekap Nilai Gabungan Assesment Peserta dan Mentor	21
Tabel 1.10 Aspek Peserta yang perlu dikembangkan	22
Tabel 1.11. Rencana Pengembangan Potensi Diri	23
Tabel 3.1. Milestone Kegiatan	31
Tabel 5.1. Mata Pelatihan yang dipilih Peserta Aksi Perubahan	47
Tabel 7.1. Komponen Pengembangan Diri	55

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Grafik Kasus Kekerasan terhadap Anak Tahun 2024	2
Gambar 1.2 Grafik Kasus Kekerasan terhadap Anak Januari-Juni 2025	2
Gambar 1.3 Analisa Masalah yang menggunakan Diagram Fishbone	9
Gambar 1.4 Analisa Stakeholder	16
Gambar 1.5 Pembentukan Tim Efektif	17
Gambar 3.1 Konsultasi dengan Mentor terkait Implementasi	30
Gambar 3.2 Survei Lokasi Pelaksanaan Sosialisasi dan Advokasi	37
Gambar 3.3 Melaksanakan Diskusi dengan RASS dan RT setempat	39
Gambar 3.4 Melaksanakan Sosialisasi dan Advokasi	40
Gambar 3.5 Dukungan Stakeholder dari BAPPEDA Prov. Sumsel	42
Gambar 3.6 Dukungan Stakeholder dari BPKAD Prov. Sumsel	42
Gambar 5.1 Sertifikat Menguasai Seni Berkomunikasi	50
Gambar 5.1 Sertifikat Membina Kerjasama Tim	51
Gambar 6.1 Media Sosial Dinas dan Stakeholder	53

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kekerasan terhadap anak merupakan isu kompleks yang memerlukan pendekatan lintas sektor dan kolaboratif. Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen membangun sinergi yang kuat dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, sektor pendidikan, layanan kesehatan, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas peduli anak. Untuk itu penulis membuat terobosan inovasi aksi perubahan **“Penguatan Kolaborasi Dinas dengan Komunitas di Sumatera Selatan dalam meningkatkan Sistem Perlindungan terhadap Anak”** pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

Kolaborasi ini bertujuan menciptakan sistem perlindungan anak yang responsif, komprehensif, dan berkelanjutan, mulai dari upaya pencegahan, deteksi dini, penanganan kasus, hingga rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban kekerasan. Strategi kolaborasi dilakukan melalui forum koordinasi lintas sektor, pelatihan bersama, integrasi layanan, kampanye publik, serta pembentukan jejaring relawan perlindungan anak di tingkat desa/kelurahan.

Dalam pelaksanaannya, Dinas berperan sebagai koordinator dan fasilitator kebijakan, sementara stakeholder saling berbagi peran sesuai kapasitas masing-masing. Komunitas dan organisasi masyarakat turut memperkuat peran pengawasan berbasis masyarakat serta pemberdayaan keluarga sebagai benteng pertama perlindungan anak.

Hasil awal menunjukkan peningkatan pelaporan kasus, penguatan layanan pendampingan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan anak. Tantangan masih ada, namun melalui kemitraan yang inklusif dan kolaboratif, diharapkan sistem perlindungan anak yang holistik dapat terus diperkuat, mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah bagi setiap

BAB I

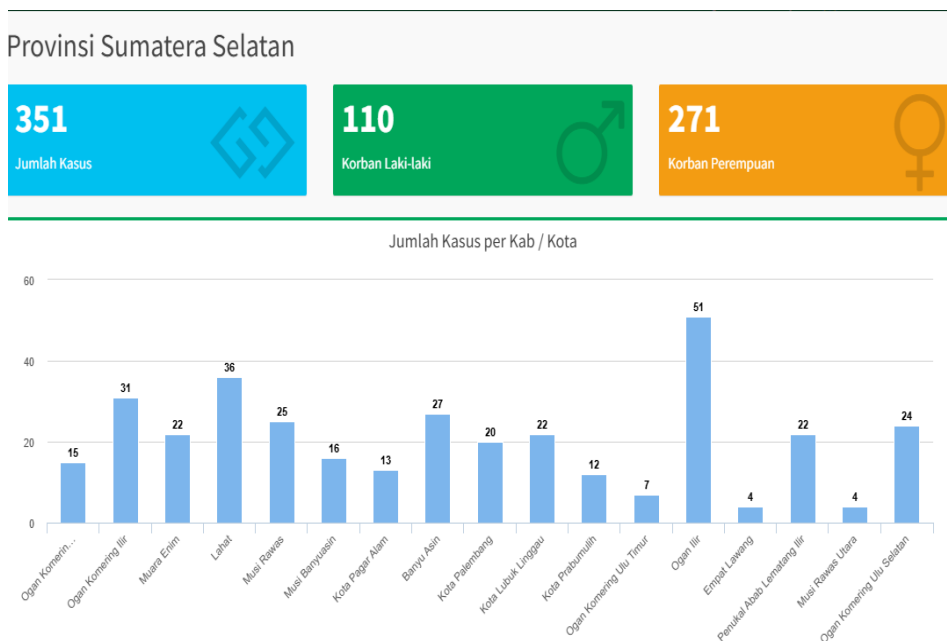
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Namun pada kenyataannya, kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, masih banyak ditemukan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama, sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28 ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Ketentuan ini menegaskan bahwa negara wajib menjamin terpenuhinya hak-hak anak tanpa terkecuali. Selanjutnya diperkuat dengan dibentuknya Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

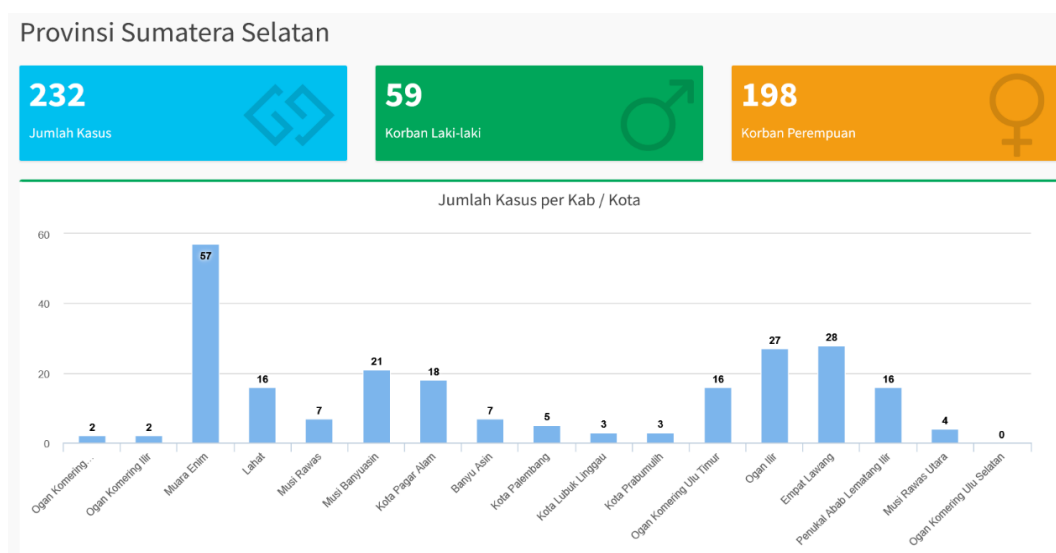
Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Tahun 2024 berdasarkan data Sistem Informasi Online Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) sebanyak 545 kasus dengan jumlah 585 korban, dimana jumlah korban anak-anak sebanyak 381 orang terdiri dari 110 orang anak laki-laki dan 271 orang anak perempuan di 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, yang dijelaskan pada gambar dibawah ini diambil dari aplikasi Sistem Informasi Online Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.



Gambar 1.1 Grafik Kasus kekerasan terhadap Anak Tahun 2024

Sumber : SIMFONI PPA Tahun 2024

Selanjutnya, jumlah kekerasan yang dilaporkan dalam aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Sumatera Selatan untuk periode Januari-Juni 2025 adalah sebanyak 232 kasus pelaporan, dengan rincian kasus sebanyak 59 anak laki-laki dan 198 kasus kekerasan terhadap anak perempuan, yang tertuang dalam gambar berikut :



Gambar 1.2 Grafik Kasus kekerasan terhadap Anak Januari-Juni 2025

Sumber : SIMFONI PPA Tahun 2025

Dalam Astacita, perlindungan anak tidak disebutkan secara eksplisit sebagai satu poin tersendiri, namun terintegrasi dalam cita-cita pembangunan manusia, keluarga, pendidikan, dan kesehatan. Implementasi dari Astacita ini harus mencakup kebijakan perlindungan anak dari kekerasan, peningkatan sistem pelaporan, rehabilitasi korban, dan penguatan keluarga sebagai pelindung utama anak.

Berikut penjelasan perlindungan anak berdasarkan Astacita:

Astacita adalah delapan cita-cita strategis yang menjadi landasan visi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (2024–2029). Dalam konteks perlindungan anak, isu ini berkaitan erat dengan beberapa poin Astacita, khususnya Astacita 4 yakni :

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.

Hal tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Perlindungan Sosial Terhadap Kekerasan

Dinas menjadi bagian dari sistem keamanan sosial dengan menyediakan layanan cepat, tepat, dan terintegrasi bagi korban kekerasan perempuan dan anak. Ini selaras dengan misi menciptakan rasa aman di masyarakat.

2. Pencegahan dan Edukasi Masyarakat

Dalam semangat pertahanan semesta, masyarakat harus dilibatkan dalam menjaga keamanan sosial. Dinas dapat mengembangkan program edukasi pencegahan kekerasan berbasis komunitas.

3. Penguatan Sistem Pelaporan dan Respons Cepat

Untuk mendukung keamanan rakyat, Dinas harus memperkuat sistem pelaporan kekerasan berbasis teknologi dan layanan respons cepat (seperti Pusat Pelayanan Terpadu – UPTD PPA).

4. Perlindungan Anak dari Eksploitasi dan Tindak Kriminal

Anak-anak kerap menjadi korban perdagangan, eksploitasi, dan kekerasan berbasis online. Dinas perlu membangun kerja sama dengan aparat keamanan dan siber untuk pencegahan.

5. Perlindungan di Masa Krisis dan Konflik

Dalam konteks bencana, konflik, atau darurat sosial, Dinas harus hadir melindungi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak, dengan penyediaan layanan psikososial dan shelter sementara.

Permasalahan anak merupakan tanggung jawab kita bersama, pengawasan anak dimulai dari lingkungan terkecil dulu yaitu lingkungan sekitar tempat tinggal anak. Aksi perubahan ini merupakan suatu gerakan baru sebagai pengembangan dari kegiatan sebelumnya. Keterlibatan Masyarakat dan komunitas dalam hal perpanjangan tangan perlindungan terhadap anak sangat diperlukan, mengingat keterbatasan pemerintah dalam hal anggaran dan sumber daya manusia, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan telah bekerjasama dengan berbagai stakeholder, baik dari Pemerintahan seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Komunikasi dan Informasi, Media Massa, serta pihak lainnya yang mempunyai tujuan yang sama untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Selanjutnya untuk lebih luas lagi jangkauan perlindungan terhadap anak, perlu pendekatan yang lebih dekat lagi kepada masyarakat, khususnya pendekatan langsung kepada anak-anak itu sendiri. Oleh sebab itu aksi perubahan ini bekerjasama dengan salah satu komunitas yang peduli dengan perkembangan pendidikan anak. Pada Aksi perubahan ini mengajak komunitas peduli anak dalam hal ini yakni Relawan Anak Sumatera Selatan (RASS) yang terdiri dari berbagai anak muda yang sedang menempuh pendidikan di bangku kuliah di Kota Palembang, yang rutin melakukan kegiatan dengan anak-anak dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan anak.

B. Tujuan

Adapun tujuan dari Rancangan Aksi Perubahan ini meliputi 3 (tiga) tujuan, yaitu :

1. Tujuan Jangka Panjang

Dengan adanya sinergitas antara dinas dengan komunitas peduli anak dalam kegiatan-kegiatannya, akan meningkatkan pelayanan dan

perlindungan terhadap anak yang belum terjangkau, sehingga dapat memanfaatkan sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas di institusi.

2. Tujuan Jangka Menengah

Terlaksananya Perluasan Jangkauan Lokasi Pelayanan Sosialisasi dan advokasi terhadap anak yang tinggal di daerah rentan kekerasan yang memberikan pengetahuan tentang bahaya kekerasan terhadap anak Bersama Komunitas Peduli Anak.

3. Tujuan Jangka Pendek

Terlaksananya pemetaan penyusunan rancangan kegiatan Perlindungan terhadap anak yang tinggal di daerah rentan serta sosialisasi dan advokasi pencegahan kekerasan yang dilakukan oleh dinas dan komunitas peduli anak .

C. Manfaat Aksi Perubahan

Perbaikan kualitas layanan perlindungan anak di suatu wilayah punya manfaat yang luas dan berjangka panjang, tidak hanya bagi negara, tapi terutama buat anak-anak itu sendiri, keluarga, dan masyarakat. Berikut penjelasan ringkas apabila dilaksanakan aksi perubahan:

1. Bagi Organisasi.

- a. Terlaksananya tugas pokok di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan peraturan dan per Undang-undangan.
- b. Mampu memberikan pelayanan cepat dan prima dibidang pencegahan kekerasan terhadap anak sehingga diharapkan dapat menekan angka kekerasan yang terjadi di masyarakat.
- c. Memberikan advokasi kepada anak dan masyarakat mengenai hak-hak nya.
- d. Mempercepat sosialisasi perlindungan terhadap anak langsung ke sasaran.

2. Bagi Anak, Keluarga, Masyarakat dan komunitas.

- a. Anak dapat bisa mengetahui jenis-jenis kekerasan sehingga mereka dapat tumbuh sehat secara fisik maupun mental
- b. Keluarga maupun masyarakat mempunyai kesadaran penuh peduli terhadap anak-anak di lingkungan sekitar, agar tidak mendapat perlakuan kekerasan dari siapapun.
- c. Tergeraknya aksi peduli masyarakat membentuk komunitas yang membuat kegiatan serupa guna memberikan sosialisasi dan advokasi terhadap anak dan keluarga yang tinggal di daerah rentan agar dapat hidup lebih baik dan terhindar dari kekerasan.

D. Ruang Lingkup Aksi Perubahan

Aksi perubahan ini berlaku pada level pelaksanaan pengendalian kegiatan selaku kasi Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

Ruang lingkup aksi perubahan akan difokuskan pada upaya pelaksanaan kegiatan adovokasi dan sosialisasi pada Dinas, dalam rangka mempercepat aksi kegiatan yang akan dilaksanakan selama masa *off campus* di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

Ruang lingkup aksi perubahan difokuskan pada upaya Peningkatan perlindungan terhadap anak-anak yang tinggal di daerah rawan kekerasan yang mana dirancang untuk mengintegrasikan sumber-sumber data dari komunitas peduli anak, agar dapat mengetahui wilayah mana saja yang rentan terhadap anak, dan perlindungan apa saja yang mereka butuhkan yang lebih akurat, terukur, dan menggambarkan *real data* yang ada di lapangan.

Dalam aksi perubahan ini, beberapa pengertian dan ruang lingkup pekerjaan yang terlibat antara lain mencakup :

1. Visi dan Misi serta Sasaran Strategis Pemerintah Daerah (Gubernur) yang menjadi tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan,
2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas, khususnya dalam hal perlindungan khusus terhadap anak.

E. Analisa Masalah Pelayanan/ Unit Kerja

1. Prioritas penyebab masalah

Untuk penentuan prioritas penyebab masalah identifikasi masalah dilakukan dengan menggunakan analisa USG (Urgency, Seriousness, Growth). USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan, dengan metode teknik scoring dengan menentukan skala nilai 1 – 5 atau 1 – 10. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi dari penyebab masalah, keseriusan masalah yang dihadapi, serta kemungkinan berkembangnya masalah tersebut semakin besar. Isu prioritas merupakan isu yang memiliki total skor tertinggi. Analisa USG dilakukan dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu. Dengan melihat adanya permasalahan tersebut di atas, perlu ditetapkan penyebab masalah prioritas agar penyelesaiannya dapat dilaksanakan secara bertahap dan lebih fokus kepada masalah utama. Untuk menetapkan penyebab masalah prioritas dilakukan melalui analisis USG sebagai berikut

1. U (*Urgency*) yaitu Seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dan dihubungkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tuntut memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi;
2. S (*Seriousness*) yaitu Seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dan dihubungkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan.
3. G (*Growth*) yaitu Seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk jika dibiarkan.

Tabel 1.1 Identifikasi masalah dan analisis

No	Identifikasi Masalah	U	S	G	Total	Prioritas
1.	Belum optimalnya kerjasama pemerintah dan Lembaga Masyarakat terkait perlindungan anak.	5	5	5	15	1
2.	Belum Optimal penerapan UU dengan hak anak	5	5	4	14	2
3.	Belum optimal pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap perlindungan anak	5	4	4	13	3

Keterangan:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| U = Urgency (Kegawatan) | 1. Kurang bermasalah |
| S = Seriousness (Mendesak) | 2. Agak bermasalah |
| G = Growth (Pertumbuhan) | 3. Cukup bermasalah |
| | 4. Bermasalah |
| | 5. Sangat bermasalah |

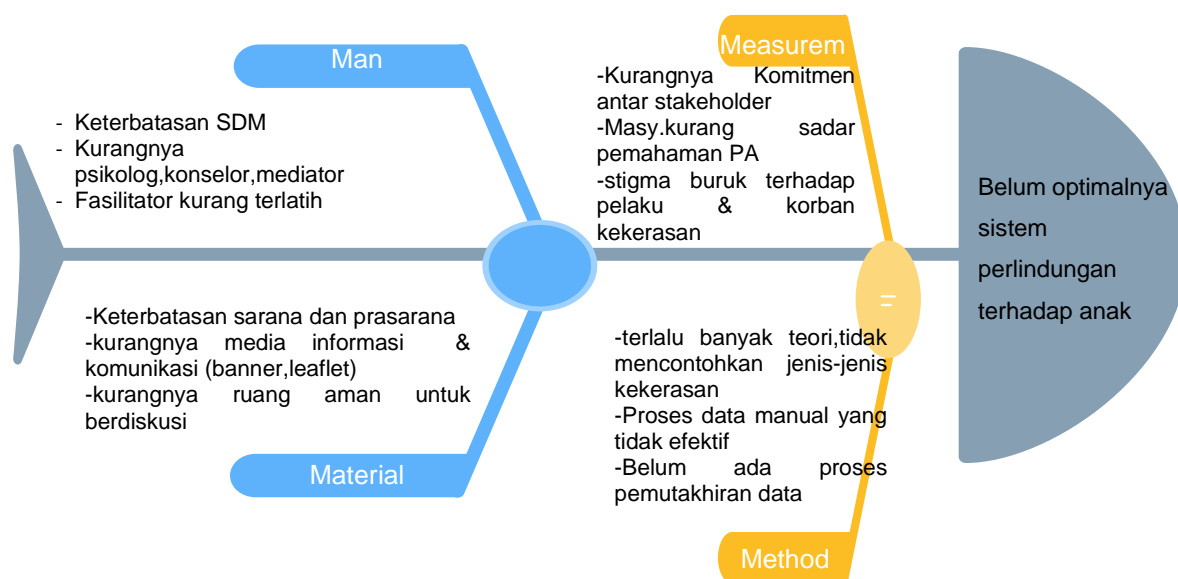
Dari hasil identifikasi pokok masalah prioritas melalui metode USG diatas, yang pokok masalah prioritas adalah belum optimalnya kerjasama pemerintah dan Lembaga Masyarakat terkait perlindungan anak, dampak masalah tersebut akan memberikan dampak negatif dan berpengaruh pada kinerja organisasi.

2. Penyebab Masalah

Dalam mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan upaya pendekatan dan Kerjasama dengan Lembaga yang peduli dengan anak, dalam hal ini kerjasama dengan komunitas-komunitas yang ada di wilayah yang peduli terhadap kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak-anak, mulai dari memberikan informasi, pembelajaran dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan. Isu belum optimalnya kerjasama tersebut, menjadi isu prioritas yang harus segera diselesaikan dengan tepat dikarenakan wilayah di Sumatera Selatan ini sangat luas, walaupun Dinas sudah banyak sekali bekerjasama dengan berbagai stakeholder dan OPD terkait, namun masih perlu

pendekatan lagi ke masyarakat untuk memberikan sosialisasi dan advokasi pencegahan kekerasan terhadap anak. Dikarenakan keberagaman suku dan budaya yang sangat menyulitkan pemerintah untuk dapat menjangkau keseluruhan wilayah.

Selanjutnya dari isu prioritas yang telah didapatkan hasil perangkaan dengan menggunakan USG akan dicari penyebab permasalahan dengan menggunakan Diagram Fishbone sebagai gambar dibawah ini :



Gambar 1.3 Analisa Masalah menggunakan diagram Fishbone

Gambar diatas menjelaskan beberapa penyebab belum optimalnya.

Man : keterbatasan SDM, kurangnya konselor, psikolog maupun mediator yang terlatih

Material : keterbatasan sarana dan prasarana dalam pengoperasian perlindungan anak, media informasi & komunikasi serta sedikitnya ruang aman untuk anak di tempat umum

Measurem: Kurangnya komitmen antar OPD, pemahaman Masyarakat tentang perlindungan anak yang minim, serta stigma buruk terhadap pelaku dan korban anak

Method : terlalu banyak teori, tidak mencontohkan jenis-jenis kekerasan dan cara menghindarinya, proses dan pemutakhiran data yang tidak efektif

Berdasarkan hasil identifikasi maka permasalahan yang dominan dan akan dipilih untuk diangkat menjadi aksi perubahan Selaku Kasi Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan adalah Belum Optimalnya Kerjasama antara pemerintah dengan Lembaga Masyarakat /Komunitas yang peduli dengan perlindungan anak. Jika masalah ini tidak diatasi maka upaya peningkatan kinerja Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak tidak berjalan sesuai dengan target baik waktu maupun hasil.

3. Terobosan / Inovasi

Berdasarkan hasil penetapan kriteria kualitas isu dengan metode USG maka terpilihlah *coreissue* yaitu “Belum Optimalnya Kerjasama antara pemerintah dengan Lembaga Masyarakat /Komunitas yang peduli dengan perlindungan anak”.

Dinas bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya serta dengan Kementerian dan Lembaga yang berada di Pemerintahan dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya yang berhubungan dengan perlindungan terhadap anak. Akan tetapi dengan semakin banyaknya yang peduli terhadap anak, bukan hanya dari kalangan Pemerintahan saja, maka akan semakin terjamin kelangsungan hidup anak-anak yang ada di sekitar kita.

Sekarang ini sangat dibutuhkannya kerjasama dan pengawasan secara berkala mengenai hak-hak anak yang memerlukan perlindungan khusus sehingga pelaksanaan tugas tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga perlu dilakukan terobosan inovasi untuk memperluas kerjasama dengan komunitas peduli anak yang dimulai dari pemetaan masalah hingga masalah yang perlu diselesaikan.

Setelah mendapatkan *coreissue* terpilih, selanjutnya akan dirancang kegiatan pemecahan isu agar diwujudkan dengan melaksanakan tahapan - tahapan kegiatan dan berkontribusi bagi misi organisasi yang dituangkan dalam matrik rancangan aksi perubahan. Adapun untuk mengatasi isu tersebut ditetapkanlah judul “Penguatan Kolaborasi Dinas dengan Komunitas di Sumatera Selatan dalam Meningkatkan Sistem Perlindungan terhadap Anak”.

4. Milestones dan Kegiatan Aksi Perubahan

Milestone dan kegiatan merupakan elemen penting dalam rancangan aksi yang membantu untuk merencanakan, melaksanakan, dan memantau kemajuan Tahapan kegiatan perubahan yang dimaksud, adalah tahapan - tahapan yang direncanakan dapat dicapai dalam waktu yang singkat dan dapat dikerjakan oleh satu orang atau tim kecil dengan waktu 2 (dua) bulan. Kegiatan milestone sangat berguna dalam aksi perubahan karena dapat memiliki tujuan dan hasil yang jelas, memiliki waktu yang terukur.

1. Milestone jangka pendek:

- a. Konsultasi mentor dan melaporkan rencana implementasi pelaksanaan aksi perubahan yaitu kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
- b. Melaksanakan diskusi dan persamaan persepsi dan membentuk tim efektif , serta melakukan rapat koordinasi dengan mentor bersama Tim efektif.
- c. Penetapan Kerjasama dengan Komunitas Relawan Anak Sumatera Selatan untuk mengumpulkan informasi daerah rentan kekerasan berdasarkan data.
- d. Merancang dan melaksanakan kegiatan Inovasi Aksi Perubahan dengan komunitas. Setelah dilakukan pendataan di tempat yang akan dijadikan sosialisasi terhadap anak, tim efektif mengundang narasumber yang dibutuhkan. Misal rentan terhadap narkoba, maka kegiatan ini akan mengundang dari pihak terkait semisal BNN Provinsi untuk memberikan arahan.
- e. Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan.

2. Milestone jangka Menengah :

- a. Terlaksananya Perluasan Jangkauan Sosialisasi dan advokasi kepada anak-anak dan keluarga yang tinggal di daerah rentan kekerasan, yang dilakukan Bersama komunitas peduli anak
- b. Monitoring dan evaluasi tempat pelaksanaan sosialisasi dan advokasi kepada anak yang tinggal di daerah rentan kekerasan

3. Milestone jangka Panjang :

Terintegrasinya data dinas dengan komunitas peduli yang anak yang ada di Sumatera Selatan, sehingga dapat menetapkan unsur-unsur yang harus diselesaikan segera dalam hal perlindungan anak yang tinggal di daerah rentan. Dengan adanya data yang akurat mengenai permasalahan anak di setiap daerah rentan kekerasan, maka pemerintah akan dengan mudah mencari solusi mengenai apa yang harus dilakukan untuk melindungi anak-anak tersebut.

Tabel 1.2 Tahapan kegiatan rancangan aksi perubahan

No	Milestone	Kegiatan	Waktu	Output
A.	Jangka Pendek (0–2 Bulan)			
1	Konsultasi mentor dan melaporkan rencana implementasi pelaksanaan aksi perubahan	a. Menjelaskan rancangan aksi perubahan b. Meminta saran dan arahan	Minggu II Mei 2025	Foto Dokumentasi
2	Melaksanakan diskusi dan persamaan persepsi serta membentuk dan rapat Bersama tim efektif.	a. Menentukan tujuan pelaksanaan kegiatan b. Membuat penetapan SK Tim Efektif	Minggu II Mei 2025	SK Tim Efektif, Daftar Hadir, Notulen Rapat
3	Penetapan Kerjasama dengan komunitas RASS & mengumpulkan informasi data anak yang tinggal di daerah rentan kekerasan	a. Memprioritaskan jenis perlindungan yang dibutuhkan anak. b. Menentukan narasumber	Minggu III Mei 2025	SK Narasumber
4	Merancang dan melaksanakan inovasi aksi perubahan dengan komunitas	a. Menyusun jadwal kegiatan. b. Mengkoordinasikan peserta dan Lokasi dengan komunitas	Minggu III Mei	Notulen Rapat, Daftar Hadir
5	Pelaksanaan evaluasi hasil sosialisasi dan advokasi.	a. Melaksanakan evaluasi sosialisasi dan adokasi b. merumuskan Kembali kebutuhan anak	Minggu ke III Juni 2025	Daftar Hadir Dokumentasi Perlindungan Anak yang dimaksud

No	Milestone	Kegiatan	Waktu	Output
B. Jangka Menengah (3–6 Bulan)				
1	Terlaksananya perluasan jangkauan sosialisasi dan advokasi kepada anak-anak dan keluarga yang tinggal di daerah rentan kekerasan	Melakukan pendataan lanjut ke daerah rentan lainnya	Minggu IV Juni 2025	Dokumentasi dan Sistem sederhana Integrasi Data
2	Monitoring dan evaluasi tempat pelaksanaan sosialisasi dan advokasi kepada anak yang tinggal di daerah rentan	Implementasi monitoring dan evaluasi tempat yang telah dilakukan kegiatan	Minggu II Juli 2025	Laporan monitoring Evaluasi
C. Jangka Panjang (6–12 Bulan)				
1	Terintegrasinya data dinas dengan komunitas peduli anak, sehingga dapat menetapkan unsur-unsur mana yang harus didahulukan untuk melindungi anak-anak yang tinggal di daerah rentan	Pengintegrasian hasil evaluasi data ke dalam dokumen Rencana kegiatan	Minggu IV Juli 2025	Data perlindungan anak yang terintegrasi

5. Sumber Daya

Terdapat 2 (dua) jenis stakeholder yang terlibat dalam aksi perubahan yang di selenggarakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan , yaitu :

1. Stakeholder Internal

1. Kepala Dinas
2. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
3. Kasi Perlindungan Khusus Anak

2. Stakeholder Eksternal

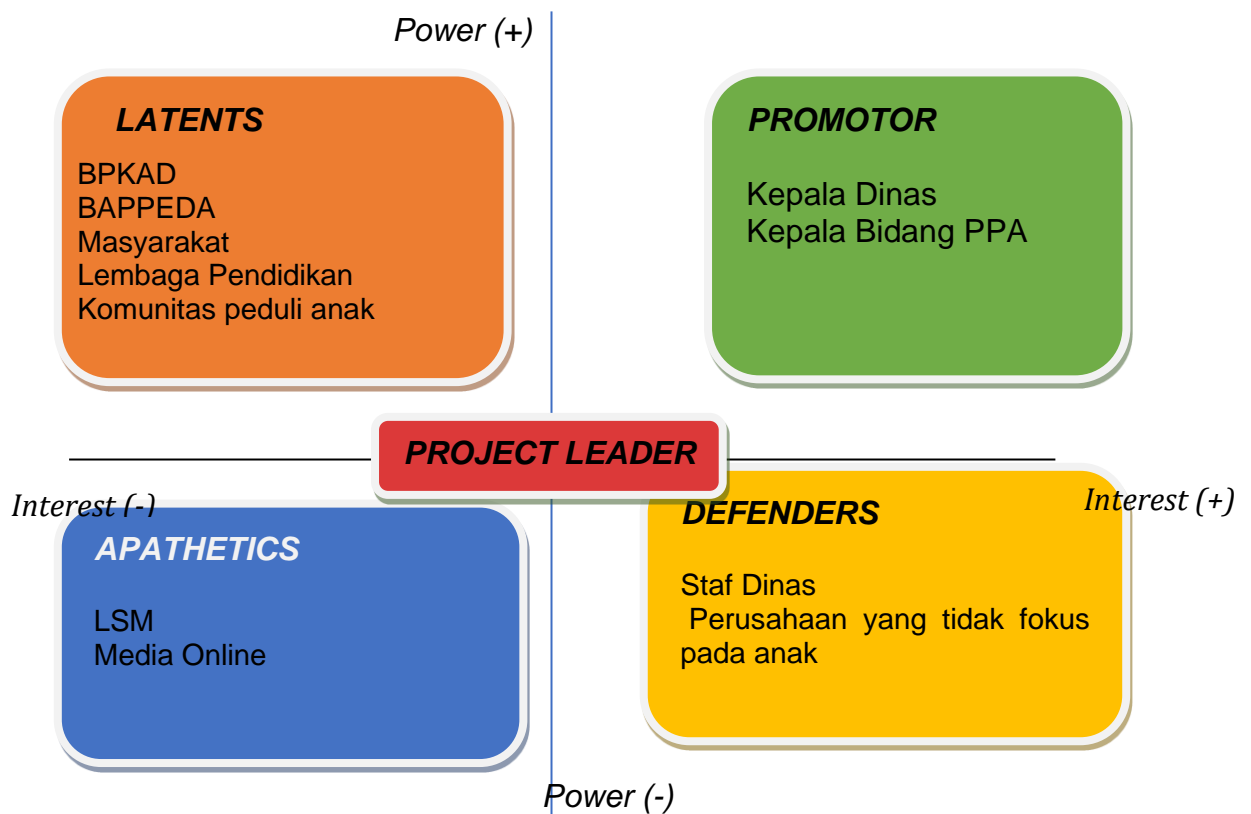
1. Anak-anak dan masyarakat
2. Komunitas Peduli Anak .

Tabel 1.4 Stakeholder Berdasarkan Pola Hubungan

Identifikasi Stakeholder	Pola Hubungan	Keterangan
Internal Intansi :		
Kepala Dinas	Konsultasi, Advokasi	Meminta advice, mendapatkan dukungan pelaksanaan dan keberlanjutan inovasi
Kabid PPA	Konsultasi, Advokasi	Mentoring
Kasi Perlindungan Khusus Anak	Koordinasi	Koordinasi dan Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi
Stakehold. Eksternal		
Identifikasi Stakeholder	Pola Hubungan	Keterangan
Anak-anak dan masyarakat	Sosialisasi dan advokasi	Kegiatan perlindungan terhadap anak
Komunitas peduli anak	Kolaborasi	Kegiatan perlindungan terhadap anak

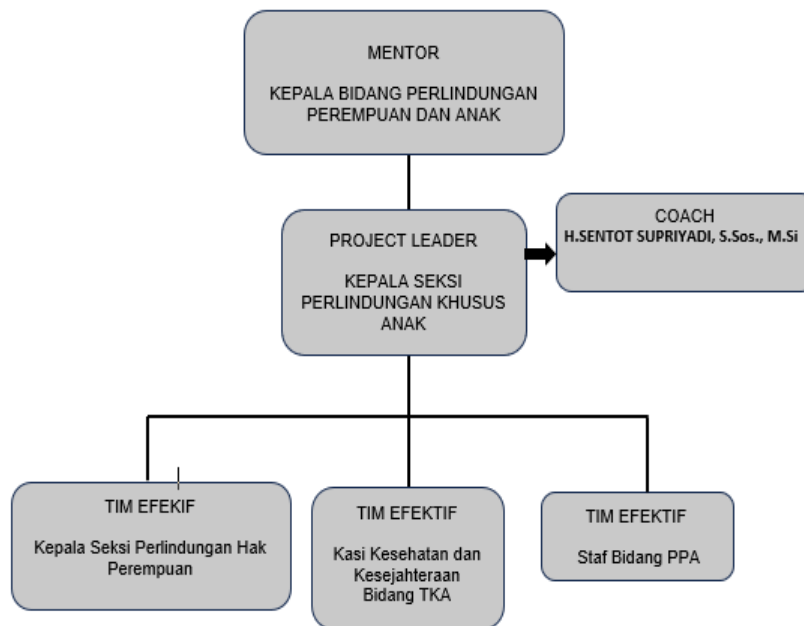
Tabel 1.5 Komunikasi dengan Stakeholders

NO	STAKEHOLDER	STRATEGI KOMUNIKASI
1	Pengaruh besar, kepentingan besar (Promoter)	Konsultasi, koordinasi rutin, dilibatkan disetiap kegiatan/harus selalu mendapat laporan
2	Pengaruh kecil, Kepentingan besar (Defenders)	Sosialisasi
3	Pengaruh besar, kepentingan kecil (Latents)	Konsultasi/diskusi dan informasi tentang progress
4	Pengaruh kecil, kepentingan kecil (Apathetics)	Sosialisasi/pemberitaan biasa



Gambar 1.4 Analisa Stakeholder

Gambar 3.2 Pembentukan Tim Efektif



Gambar 1.5 Pembentukan Tim Efektif

Tabel 1.6 Susunan Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan

JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KOMPETENSI
Mentor (Kepala Perlindungan Perempuan dan Anak)	<ol style="list-style-type: none"> Bertindak sebagai penanggung jawab dan pengarah proyek perubahan Memberikan persetujuan, dukungan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan aksi perubahan Membantu memfasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan dalam pelaksanaan aksi perubahan 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami alur aksi perubahan yang akan dilaksanakan Memiliki komitmen terhadap aksi perubahan
Coach (Widyaiswara)	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan saran dan masukan selama pelaksanaan kegiatan Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan 	Memahami alur aksi perubahan yang akan dilaksanakan

	3. Membantu menyelesaikan kendala / hambatan	
Project Leader (Kasi Perlindungan Khusus Anak)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan dan melakukan koordinasi mengenai pelaksanaan aksi perubahan 2. Memimpin aksi perubahan 3. Melakukan Kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder 4. Melaporkan perkembangan aksi perubahan kepada mentor dan coach 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami alur aksi perubahan yang akan dilaksanakan 2. Memiliki komitmen dalam aksi perubahan
Para Kepala Seksi Di Bidang PPA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan dukungan secara berkelanjutan 2. Memberikan saran dan masukan apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaan aksi perubahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengendalikan tim 2. Memiliki kemampuan berkolaborasi dengan tim
Staf Bidang PPA & UPTD PPA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan survei/pengecekan lapangan selama masa proyek perubahan; 2. Memeriksa kesiapan operasional, peralatan dan kebutuhan material di lapangan; 3. Melakukan pekerjaan dilapangan sesuai kebutuhan dan melaporkan hasil kegiatan ke project leader 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan tentang aksi perubahan

6. Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan

Dalam pelaksanaan aksi perubahan, diperlukannya pengembangan potensi pegawai guna mencapai tujuan dari aksi perubahan yang dilakukan. Untuk menghadapi perubahan, tim perlu mengembangkan kompetensi untuk menghadapi tantangan yang akan muncul. Pengembangan kompetensi ini dilakukan guna mencapai tujuan dari aksi perubahan yang telah ditetapkan.

Berikut adalah rencana strategi pengembangan kompetensi yang tertuang dalam tabel.

Tabel 1.7 Pengembangan Kompetensi

No	Pihak Terdampak Aksi Perubahan	Kompetensi yang Dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi (klasikal/non klasikal)
1.	Project Leader	Memahami Peraturan Perlindungan Anak	Non Klasikal
2.	Tim Efektif	Memahami rancangan aksi yang akan dilaksanakan	Non Klasikal

A. HASIL PEMETAAN

Tabel 1. 8 Rekap Nilai Akhir Perilaku Peserta

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA					
Nama Peserta	: Baryanti Arthini,S.E.,M.Si		Nama Mentor	: Hj. Musharmina,S.AP	
NIP	: 198112062006042016		NIP:	: 197306161992032001	
Jabatan	: Kasi Perlindungan Khusus Anak		Jabatan	: Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak	
Instansi	: DPPPA Prov. Sumsel		Instansi	: DPPPA Prov. Sumsel	
Program	: Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I				
Nilai Komponen					
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub
Peserta	8.47	8.59	8.65	8.57	Baik
Mentor	8.61	8.68	8.61	8.63	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	8.57	8.65	8.62	8.61	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	
Keterangan Kualifikasi			Akhir Sikap Perilaku		
9.99-10	Istimewa		8.61		
7-8.99	Baik				
5-6.99	Cukup		Kualifikasi: Baik		
3-4.99	Kurang				
1-2.99	Sangat Kurang				
REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:					
Istimewa	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi				
Baik	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan pengawas				
Cukup	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas				
Kurang Sangat Kurang	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas				

Tabel 1. 9 Rekap Nilai gabungan peserta dan mentor

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR					
Nama	: Bariyanti Arthini,S.E.,M.Si		Nama Mentor	: Hj. Musharmina,S.AP	
NIP	: 198112062006042016		NIP:	: 197306161992032001	
Jabatan	: Kasi Perlindungan Khusus Anak		Jabatan	: Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak	
Instansi	: DPPPA Prov. Sumsel		Instansi	: DPPPA Prov. Sumsel	
Program	: Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I				
Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor	Nilai Rata-Rata	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	8.5	8.6	8.57	Baik
	Komitmen	8.4	8.6	8.54	Baik
	Kedisiplinan	8.4	8.65	8.58	Baik
	Kejujuran	8.5	8.6	8.57	Baik
	Konsistensi	8.5	8.6	8.57	Baik
	Pengambilan Keputusan	8.5	8.6	8.57	Baik
	Rata-Rata	8.47	8.61	8.57	Baik
Kerjasama	Kerjasama Internal	8.5	8.6	8.57	Baik
	Kerjasama Eksternal	8.55	8.6	8.59	Baik
	Komunikasi	8.6	8.8	8.74	Baik
	Fleksibilitas	8.6	8.655	8.64	Baik
	Komitmen dalam Tim	8.7	8.75	8.74	Baik
	Rata-Rata	8.59	8.68	8.65	Baik
Mengelola Perubahan	Pelayanan Publik	8.7	8.6	8.63	Baik
	Adaptabilitas	8.7	8.7	8.70	Baik
	Pengembangan orang	8.65	8.6	8.62	Baik
	Orientasi pada hasil	8.6	8.6	8.60	Baik
	Inisiatif	8.6	8.55	8.57	Baik
	Rata-Rata	8.65	8.61	8.62	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8.57	8.63	8.61	Baik
Keterangan Kualifikasi					
9.99-10	Istimewa				
7-8.99	Baik				
5-6.99	Cukup				
3-4.99	Kurang				
1-2.99	Sangat Kurang				

B. RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Berdasarkan hasil rekap penilaian gabungan antara peserta dan mentor, maka terdapat beberapa aspek dari peserta yang dianggap perlu untuk dilakukan rencana pengembangan potensi diri, agar kedepan diharapkan bahwa peserta dapat memaksimalkan potensi diri yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang di Seksi Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

Aspek tersebut terdiri dari beberapa komponen dan sub komponen antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.10. Aspek Peserta Yang Perlu dikembangkan

No	Komponen	Sub Komponen	Nilai Rata-Rata
1	Integritas	Komitmen	8.40
		Kedisiplinan	8.40
2	Kerja Sama	Internal	8.50
3	Mengelola Perubahan	Orientasi pada hasil	8.60
		Inisiatif	8.60

Maka dianggap perlu untuk membuat Rancangan Pengembangan Potensi Diri agar peserta dapat memiliki panduan dalam rangka meningkatkan komponen dan sub komponen yang memiliki nilai rata-rata paling rendah, pengembangan potensi diri tersebut dilakukan dengan cara penugasan individu dan melalui penugasan yang diberikan oleh atasan, seperti tertuang pada tabel rencana pengembangan potensi diri dibawah ini :

Tabel 1.11. Rencana Pengembangan Potensi Diri

No.	Komponen Perilaku Kepemimpinan	Sub Komponen yang Perlu Pengembangan	Rancangan Pengembangan Potensi Diri	Evidence	Individu / Penugasan
1	Integritas	Kedisiplinan dalam mengikuti aturan kerja dan etika profesional	Membiasakan diri dengan penegakan disiplin dan kesesuaian perilaku kerja dengan kode etik. Mempelajari arah atau tujuan besar dari aturan atau komitmen yang dilekatkan pada perilaku kerja.	Evaluasi kinerja periodik	Penugasan untuk memimpin tim dalam situasi yang membutuhkan kedisiplinan tinggi.
2	Kerjasama	Fleksibilitas dalam beradaptasi dengan berbagai latar belakang	Mengikuti pelatihan mengenai komunikasi adaptif dan kepemimpinan transformasional. Memperbanyak forum-forum diskusi atau komunitas di lingkungan organisasi untuk berhadapan dengan pihak lain.	Pengamatan dalam tugas lapangan	Penugasan dalam proyek lintas unit kerja yang melibatkan banyak pihak berbeda.
3	Mengelola Perubahan	Pengembangan orang lain melalui peningkatan kompetensi tim	Menyusun rencana pengembangan individu dalam tim dan memfasilitasi kesempatan belajar bagi anggota. Memperbanyak referensi pendukung dalam pengembangan potensi diri yang selaras dengan minat dan kebutuhan organisasi.	Hasil evaluasi kompetensi individu	Penugasan untuk membimbing anggota tim dalam proyek jangka pendek dengan evaluasi hasil kerja.
4	Koordinasi	Penyusunan dan pemantauan program	Mengoptimalkan penggunaan sistem TI untuk koordinasi dan pelaporan antar unit kerja dan stakeholder	Laporan evaluasi proyek	Penugasan untuk mengkoordinasikan kegiatan besar dengan banyak stakeholder.

BAB II

DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

A. Membangun Integritas Kinerja Pelayanan

Integritas adalah kemampuan senantiasa untuk memegang teguh prinsip-prinsip moral dan menolak untuk mengubahnya walaupun dalam kondisi dan situasi yang dihadapi sangat sulit, serta banyak tantangan yang berupaya untuk melemahkan prinsip-prinsip moral dan etika yang dipegang teguhnya. Integritas dibutuhkan oleh siapa saja, tidak hanya pemimpin namun juga yang dipimpinnya. Seorang pemimpin harus membangun integritas dalam melaksanakan tugasnya agar orang-orang yang dipimpin mendapatkan jaminan bahwa pemimpin mereka dapat dipercaya jika mereka harus menjadi pengikut- pengikutnya. Mereka merasa yakin bahwa sang pemimpin memperhatikan kepentingan setiap anggota tim dan sang pemimpin harus menaruh kepercayaan bahwa para anggota timnya melakukan tugas tanggung-jawab mereka. Pemimpin dan yang dipimpin sama- sama ingin mengetahui bahwa mereka akan menepati janji-janjinya dan tidak pernah luntur dalam komitmennya. Orang yang hidup dengan integritas tidak akan mau dan mampu untuk mematahkan kepercayaan dari mereka yang menaruh kepercayaan kepada dirinya. Mereka senantiasa memilih yang benar dan berpihak kepada kebenaran. Ini adalah tanda dari integritas seseorang. Mengatakan kebenaran secara bertanggung jawab, bahkan ketika merasa tidak enak mengatakannya. Integritas itu menjadi kunci utama kepemimpinan "bagaimana ia membuat keputusan yang benar pada waktu yang benar" dalam bersikap dan berperilaku, karena disitulah terletak pondasi dalam membangun kepercayaan dan hubungan antara individu dalam organisasi.

Penguatan sistem integritas dan integritas pegawai aparatur sipil negara diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam pembangunan integritas pegawai ASN pada level individu telah ditetapkan dengan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pembangunan Integritas Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa integritas adalah konsistensi berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan atasan, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, serta mampu mendorong terciptanya budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Sedangkan pembangunan integritas pegawai ASN adalah upaya untuk mewujudkan, memperkuat, dan mempertahankan nilai dasar, daya nalar dan keberanian moral ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pembangunan Integritas Pegawai Aparatur Sipil Negara, pembangunan integritas pegawai ASN diukur dari:

1. Kejujuran;
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
3. Kemampuan bekerja sama;
4. Pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Pedoman umum Pembangunan Integritas Pegawai ASN merupakan mandat prinsip aparatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang juga dimaksudkan untuk memperkuat pembangunan integritas ASN pada level organisasi. Pembangunan integritas pada level organisasi tidak dapat dipisahkan dari pembangunan pada level individu. Keluaran (output) dari upaya pembangunan integritas individu adalah dampak positif pada kinerja organisasi Instansi Pemerintah, yang dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah. Sebagai seorang leader project dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi semua tahapan aksi perubahan, termasuk memimpin aksi perubahan **“Penguatan Kolaborasi Dinas dengan Komunitas di Sumatera Selatan dalam meningkatkan**

Sistem Perlindungan terhadap Anak” leader project harus menjadi sosok yang memiliki integritas dalam melaksanakan fungsi kepemimpinan selama atau setelah aksi perubahan dilakukan.

Hal ini dikarenakan sebagai seorang pemimpin aksi perubahan maka akan menjadi pusat perhatian dan teladan terutama bagi bawahannya. Integritas akan menjadi nilai bagi si pemimpin itu sendiri, dikarenakan saat menerapkan nilai- nilai integritas dengan baik maka si pemimpin akan dipercaya sehingga segala ide perubahan yang ditawarkan dapat diterima dan dilaksanakan oleh bawahannya. Dengan kata lain, menjadi modal dalam mempengaruhi orang lain. Selanjutnya, terkait penerapan nilai-nilai integritas dalam aksi perubahan **“Penguatan Kolaborasi Dinas dengan Komunitas di Sumatera Selatan dalam meningkatkan Sistem Perlindungan terhadap Anak”**, dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi, advokasi, Rapat, Monitoring, Koordinasi Tim, mengumpulkan data kasus kekerasan terhadap anak yang menjadi Kewenangan Provinsi. Pelaksanaan aksi perubahan sesuai komitmen bersama menjadi sangat penting dalam membangun integritas organisasi. Berikut persyaratan bagi seorang pemimpin dalam membangun integritas ditempat kerja, yaitu:

1. Memiliki etika kepemimpinan

Bagaimana menjadi pimpinan yang beretika dan profesional serta konsisten sesuai dengan harapan organisasi. Berikut ciri-ciri etika kepemimpinan :

a. Bermartabat dan penuh hormat

Pemimpin yang beretika menghormati karyanya, mendengarkan mereka, menghargai pendapat mereka, mengakui kontribusi. Setiap orang, dan memperlakukan bawahan sebagai partner penting dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan bersama.

b. Melayani Orang Lain

Pemimpin etis tidak menggunakan bawahannya sebagai “Kendaraan” untuk mewujudkan ambisi pribadinya. Pemimpin meletakkan kepentingan setiap anggota diatas kepentingannya, kemudian berusaha menyelaraskannya dengan tujuan organisasi.

- c. Berkeadilan
Adil merupakan bagian dari etika kepemimpinan yang penting. Pemimpin yang etis adalah mereka yang dapat berlaku adil dan menerapkan Kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi semua anggotanya.
- c. Jujur
Kejujuran adalah standar moral paling tinggi yang berlaku di seluruh dunia. Hampir sebagian besar masalah dalam hubungan interpersonal bersumber pada ketidakjujuran, Namun pemimpin etis punya integritas tinggi dapat dipercaya, dan menginspirasi pengikutnya untuk bersikap sama.
- d. Membangun Komunitas
Pemimpin yang etis berfikir pada penguatan tim dan organisasi, dan berusaha untuk menumbuhkan kebersamaan berdasarkan nilai-nilai yang diterima seluruh anggota. Prinsipnya tidak ada individu yang lebih penting dari sebuah tim.
- e. Menggunakan nilai sebagai landasan keputusan
Pemimpin beretika mengambil keputusan dengan mempertimbangkan moral dan nilai-nilai organisasi tidak berorientasi pada keuntungan sesaat. Meski sebuah pilihan tampak menjanjikan, namun jika melanggar kode etik organisasi, maka tidak akan pernah menjadi sebuah keputusan.
- f. Menjadi Teladan
Pemimpin beretika tidak berada dibelakang, berbicara untuk memerintah pengikutnya. Mereka selalu di depan memberikan contoh perilaku yang etis dan berbasis nilai. Seseorang pemimpin tidak bisa berharap pengikutnya jujur jika tidak memulai sikap transparan pada dirinya.

2. Manajemen Pengawasan yang aktif

Manajemen dan pengawasan aktif dapat berupa bagaimana pemimpin menjadi seseorang yang efektif dan efisien dengan keberhasilannya mengelola lingkungan kerjanya, Adapun langkah yang dapat ditempuh antara lain:

- a. Gunakan alat manajemen yang tersedia
Memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mengelola bawahan, memantau kinerja tim, membangun keterpaduan kelompok dan mengatur arah strategis timnya, Beberapa sumber daya ini dapat berupa SOP ditempat kerja, panduan etika, penilaian kinerja dan pengembangan profesional sehari-hari.
- b. Mengenal bawahannya
Menaruh minat pada bawahannya dan secara aktif terlibat dalam pengelolaan pekerjaan mereka, dan bagaimana mereka melakukannya. Mengetahui bawahan adalah tentang menunjukkan rasa hormat dan memberikan dukungan di tempat kerja. Seseorang pemimpin mungkin juga ingin mempertimbangkan jika bawahannya memiliki keterampilan atau pengalaman yang bisa menguntungkan timnya.
- c. Berbagi data prestasi kerja dan keluhan dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah kinerja dan integritas di tempat kerja, Data-data yang dihasilkan bagian sumber daya manusia dapat digunakan untuk memantau trend di area-area yang ada, dan untuk membantu mengidentifikasi potensi kesalahan atau isu- isu manajemen di area-area tersebut.

B. Pengelolaan Pelayanan (Pemanfaatan Teknologi Informasi)

Di era digital saat ini, pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam pengelolaan pelayanan publik menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan khususnya bidang Perlindungan Perempuan dan Anak memberikan layanan pencegahan kekerasan, dituntut untuk menyelenggarakan pelayanan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Pemanfaatan TI merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, mempercepat alur kerja, dan memperkuat sistem monitoring serta pelaporan.

Pemanfaatan TI dalam pelayanan publik didasarkan pada prinsip:

- **Efisiensi:** mengurangi waktu dan biaya pelayanan. Jadi menggunakan laporan SAPA 129, Dimana pelaporan Masyarakat bukan hanya datang ke UPTD PPA saja, tapi bisa dengan menggunakan telepon ataupun pesan WhatsApp.
- **Transparansi:** mempermudah akses masyarakat terhadap informasi layanan.
- **Akuntabilitas:** menyediakan rekam jejak dan pelaporan berbasis data.
- **Partisipasi:** memperluas keterlibatan masyarakat melalui kanal digital.

Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penggunaan teknologi adalah bagian dari upaya modernisasi layanan untuk meningkatkan kepuasan penerima manfaat.

C. Pengelolaan Tim Efektif

Dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat, efektivitas kerja tim menjadi salah satu faktor kunci dalam mencapai tujuan organisasi. Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, pengelolaan tim yang baik menjadi fondasi dalam menciptakan kerja sama yang solid, efisiensi pelaksanaan tugas, serta pencapaian hasil yang optimal. Tantangan di lapangan yang kompleks menuntut koordinasi lintas bagian yang terstruktur, dinamis, dan responsif.

Tim yang efektif adalah kelompok kerja yang memiliki:

- Tujuan bersama yang jelas.
- Peran dan tanggung jawab yang terdefinisi.
- Komunikasi terbuka dan saling percaya.
- Kepemimpinan yang suportif.

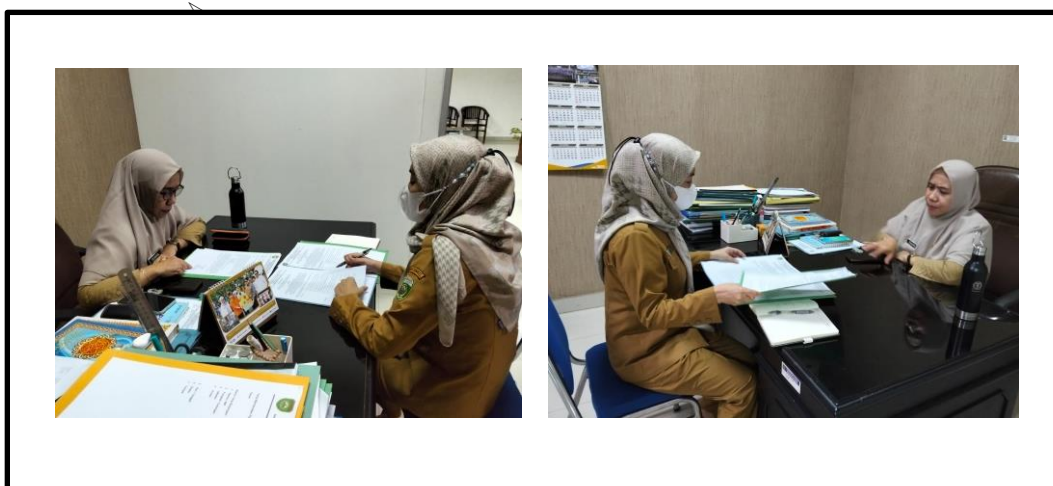
BAB III

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

A. Capaian dan Perbaikan Kinerja Pelayanan

Setelah mendapatkan persetujuan dari penguji atas Rancangan Aksi Perubahan pada tanggal 7 Mei 2025, langkah peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) selanjutnya adalah melakukan implementasi aksi perubahan di tempat tugas, yaitu di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Aksi perubahan ini merupakan wujud dari upaya perbaikan pelayanan publik yang ada di tempat kerja peserta PKP.

Adapun judul aksi perubahan “Penguatan Kolaborasi Dinas dengan Komunitas di Sumatera Selatan dalam Meningkatkan Sistem Perlindungan terhadap Anak” di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Peserta Diklat sebagai *project leader* telah melakukan persiapan untuk menyusun kegiatan aksi perubahan yang akan dilakukan selama dua bulan setelah Rancangan Aksi Perubahan dipresentasikan, disepakati, dan disetujui.



Gambar 3.1 Konsultasi dengan Mentor Terkait Implementasi Aksi Perubahan

Sebagai langkah awal, Peserta PKP menghadap mentor pada Hari Senin, 05 Mei 2025. Pada kesempatan tersebut peserta menindaklanjuti hasil dari seminar Rancangan Aksi Perubahan, kemudian menyampaikan langkah teknis terkait implementasi aksi perubahan. Peserta juga memohon bimbingan arahan dan petunjuk mentor sehingga aksi perubahan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Agar dalam pelaksanaan aksi perubahan ini dapat berjalan dengan baik diperlukan komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan seluruh stakeholders yang terlibat dalam pelaksanaan aksi perubahan. Tahapan membangun Tim Efektif merupakan hal penting agar pelaksanaan aksi perubahan dapat berjalan dengan hasil sesuai yang diharapkan,. Dalam pelaksanaan penyusunan laporan aksi perubahan ini, peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas selaku *Project Leader* menyadari bukan sesuatu yang mudah karena diperlukan juga penguatan koordinasi dengan para stakeholders baik eksternal maupun internal ditengah kesibukan masing-masing dalam pelaksanaan tugas.

Uraian pelaksanaan implementasi aksi perubahan “Penguatan Kolaborasi Dinas dengan Komunitas di Sumatera Selatan dalam Meningkatkan Sistem Perlindungan terhadap Anak” di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

a. Indikator Keberhasilan Aksi Perubahan

Kegiatan Implementasi Aksi Perubahan ini dapat terwujud apabila telah memenuhi indikator keberhasilan sebagaimana tercantum pada Tabel berikut :

Tabel 3.1 Milestone kegiatan

No	Milestone	Target	Capaian	Output
A. Jangka Pendek (0–2 Bulan)				
1	Konsultasi mentor dan melaporkan rencana implementasi pelaksanaan aksi perubahan	100 %	100 %	Foto Dokumentasi

No	Milestone	Target	Capaian	Output
	Minggu II Mei 2025			
2	Melaksanakan diskusi dan persamaan persepsi serta membentuk dan rapat Bersama tim efektif. Minggu II Mei 2025	100 %	100 %	SK Tim Efektif, Daftar Hadir, Notulen Rapat
3	Penetapan Kerjasama dengan komunitas RASS & mengumpulkan informasi data anak yang tinggal di daerah rentan kekerasan Minggu III Mei 2025	100 %	100 %	SK Narasumber
4	Merancang dan melaksanakan inovasi aksi perubahan dengan komunitas Minggu III Mei 2025	100 %	100 %	Notulen Rapat, Daftar Hadir
5	Pelaksanaan evaluasi hasil sosialisasi dan advokasi. Minggu III Juni 2025	100 %	100 %	Daftar Hadir Dokumentasi Perlindungan Anak yang dimaksud
B.	Jangka Menengah (3–6 Bulan)			
1	Terlaksananya perluasan jangkauan sosialisasi dan advokasi kepada anak-anak dan keluarga yang tinggal di daerah rentan kekerasan Minggu IV Juni 2025	100 %	100 %	Dokumentasi dan Sistem sederhana Integrasi Data

No	Milestone	Target	Capaian	Output
2	Monitoring dan evaluasi tempat pelaksanaan sosialisasi dan advokasi kepada anak yang tinggal di daerah rentan Minggu II Juli 2025	100 %	100%	Laporan monitoring Evaluasi
C. Jangka Panjang (6–12 Bulan)				
1	Terintegrasinya data dinas dengan komunitas peduli anak, sehingga dapat menetapkan unsur-unsur mana yang harus didahulukan untuk melindungi anak-anak yang tinggal di daerah rentan Minggu IV Juli 2025	100 %	50%	Data perlindungan anak yang terintegrasi

b. Pelaksanaan Aksi Perubahan Jangka Pendek

Setelah Seminar Rancangan Aksi Perubahan mendapatkan persetujuan dari mentor, coach, dan penguji untuk dilanjutkan, maka langkah peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas selanjutnya adalah mengimplementasikan aksi perubahan. Pada tahapan jangka pendek, aksi perubahan ini dilakukan dari tanggal 08 Mei 2025 sampai dengan tanggal 07 Juli 2025, dengan uraian sebagai berikut :

1. Konsultasi Dengan Mentor Mengenai Rencana Kegiatan Aksi Perubahan dan Meminta Dukungan Mentor.

Konsultasi dengan mentor mengenai rencana kegiatan aksi perubahan dengan judul **“Penguatan Kolaborasi Dinas dengan Komunitas di Sumatera Selatan dalam Meningkatkan Sistem**

Perlindungan terhadap Anak” pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2025 bertempat di ruang kerja Kepala Bidang.

Adapun konsultasi tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus-menerus untuk melaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakan, agar memperoleh target kinerja yang maksimal dalam pelaksanaan kegiatan.

Tahap pertama pengimplementasian kegiatan yang melibatkan komunitas yang pertama adalah menunjuk komunitas mana yang ada di Provinsi Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang yang secara rutin melakukan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak di daerah-daerah rentan kekerasan. Peserta melihat bahwa ada banyak sekali komunitas/ lembaga yang peduli pada anak, mulai dari organisasi masyarakat, kepemudaan, orang tua, maupun dari anak itu sendiri, ada 1 (satu) komunitas relawan yang menarik bagi penulis untuk dapat diajak bekerjasama, mereka terdiri dari anak-anak kuliah yang ada di Kota Palembang yang selalu giat baik di masyarakat maupun di media sosial, mereka adalah Relawan Anak Sumatera Selatan (RASS).

Relawan Anak Sumatera Selatan terbentuk sebagai wadah bagi anak-anak di Sumatera Selatan untuk berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Sejarah pembentukannya tidak merujuk pada satu peristiwa atau tanggal spesifik, melainkan lebih pada proses tumbuh kembang kesadaran akan pentingnya peran anak dalam pembangunan daerah dan kepedulian terhadap sesama.

Berikut adalah beberapa poin yang dapat menjelaskan sejarah terbentuknya Relawan Anak Sumatera Selatan:

- **Kesadaran akan Potensi Anak:**

Seiring waktu, muncul kesadaran bahwa anak-anak memiliki potensi besar untuk berkontribusi positif bagi masyarakat. Mereka memiliki energi, kreativitas, dan semangat yang dapat diarahkan untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan.

- **Faktor Lingkungan dan Pendidikan:**

Lingkungan yang mendukung, seperti keluarga, sekolah, dan komunitas, berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran ini. Pendidikan yang inklusif dan berwawasan sosial juga turut membentuk pola pikir anak-anak untuk peduli terhadap lingkungan sekitar.

- **Inisiatif dari Berbagai Pihak:**

Terbentuknya Relawan Anak Sumatera Selatan tidak lepas dari inisiatif berbagai pihak, seperti organisasi kepemudaan, sekolah, dan individu yang peduli. Mereka melihat perlunya wadah yang terstruktur untuk mewadahi kegiatan relawan anak.

- **Tujuan Mulia:**

Tujuan utama Relawan Anak Sumatera Selatan adalah untuk memberdayakan anak-anak agar menjadi agen perubahan yang peduli terhadap isu-isu sosial, lingkungan, dan kemanusiaan di Sumatera Selatan.

- **Kegiatan yang Bervariasi:**

Relawan Anak Sumatera Selatan terlibat dalam berbagai kegiatan, seperti aksi sosial, kampanye lingkungan, kegiatan edukasi, dan bantuan kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa wadah ini memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka sambil berkontribusi pada masyarakat.

Dengan demikian, Relawan Anak Sumatera Selatan lahir dari proses panjang yang melibatkan kesadaran akan potensi anak, dukungan lingkungan dan pendidikan, serta inisiatif dari berbagai pihak. Wadah ini menjadi bukti nyata bahwa anak-anak memiliki peran penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Melaksanakan diskusi bersama Tim efektif.

Rapat persiapan pelaksanaan sosialisasi dan advokasi yang ditujukan untuk anak-anak yang tinggal di daerah rentan kekerasan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 pukul 09.30 WIB s.d selesai di ruang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan menghasilkan keputusan diantaranya :

- a. Membentuk kerjasama dengan Relawan Anak Sumatera Selatan, dimana komunitas ini sudah mempunyai database anak yang akan dilatih yang tinggal di daerah rentan kekerasan.
- b. Sosialisasi dan advokasi terhadap anak dan orang tua yang tinggal di daerah rentan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2025 di Kampung Anyaman Palembang Pukul 08.30 WIB sampai selesai.
- c. Mobilisasi dukungan stakeholder dilaksanakan mulai tanggal 20 Mei 2025 sampai selesai.

Setelah berkoordinasi dengan mentor terkait pembentukan Tim Efektif, Leader bersama Mentor mengadakan untuk menyusun struktur organisasi dan nama-nama anggota Tim Efektif. Adapun kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan 2 (dua) bidang, yakni bidang Perlindungan Perempuan dan Anak serta UPTD PPA di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Karena tisi yang saling keterkaitan antara 2 (dua) bidang.

3. Menetapkan Kerjasama dengan Komunitas dan mengumpulkan data

Setelah memutuskan untuk bekerjasama dengan Komunitas Relawan Anak Sumatera Selatan, tim melakukan pendataan terhadap wilayah mana yang akan dilaksanakan sosialisasi dan advokasi.

Tahap pertama adalah berkoordinasi dengan anak-anak Relawan Anak Sumatera Selatan, daerah mana saja yang mereka selalu melaksanakan giat pembelajaran. Selanjutnya setelah terpetakan

daerah-daerah yang selalu mereka kunjungi, seluruh tim merumuskan hal-hal apa saja yang menjadi masalah penting yang dihadapi oleh anak-anak daerah binaan. Setelah terpetakan, ada 3 (tiga) wilayah binaan anak Relawan Anak Sumatera Selatan yang menarik bagi tim dan layak untuk dijadikan lokasi kegiatan sosialisasi dan advokasi pencegahan kekerasan. Adapun 3 (tiga) wilayah tersebut adalah daerah Kertapati, Gandus, dan Daerah Kampung Anyaman 3-4 Ulu. Melalui berbagai foto dan dokumentasi yang dimiliki oleh Relawan Anak Sumatera Selatan, tim efektif memutuskan untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan advokasi di daerah 3-4 Ulu Kota Palembang.

Pemilihan daerah tersebut dikarenakan banyak terdapat anak-anak umur 5-18 tahun, hidup dilingkungan padat penduduk, serta beragam asal daerah penduduk setempat, sehingga cocok untuk dijadikan lokasi sosialisasi dan advokasi terhadap anak dan orang tua di wilayah tersebut.

Aksi pertama yaitu, tim melakukan kunjungan ke lokasi yang akan dilaksanakan kegiatan.



Gambar 3.2 Survei lokasi pelaksanaan sosialisasi dan advokasi

Setelah melakukan janji untuk bertemu di lokasi, tim efektif, Relawan Anak Sumatera Selatan, dan pejabat RT setempat, kami melakukan perjalanan kesana. Jalan untuk menuju ke lokasi berada di Jalan Prajurit Nangyu Kelurahan 3-4 Ulu Kota Palembang. Untuk masuk ke tempat sosialisasi hanya bisa dijangkau dengan kendaraan bermotor roda 2 dan becak, sedangkan akses untuk masuk kendaraan roda 4 sangat sempit dan

berbahaya dikarenakan di setiap depan rumah warga banyak yang berjualan dengan membuat warung ataupun tempat untuk menaruh jualannya didepan rumah.

Keluarga di daerah tersebut rata-rata mencari nafkah dengan cara berjualan, sedangkan para ayah atau tulang punggung keluarga kebanyakan bekerja serabutan. Ada yang bekerja menjadi petugas kebersihan, mencari ikan di sungai, bekerja di pasar ataupun menjadi tukang becak, serta menjadi penganyam daun kelapa untuk mencari rezeki. Sementara para ibu kebanyakan membantu mencari nafkah dengan cara berjualan sayur masak ataupun membuka warung di depan rumahnya masing-masing. Sebelumnya masyarakat daerah tersebut pernah dilatih oleh pihak pemerintah di Kota Palembang untuk memanfaatkan daun kelapa untuk dijadikan hasil kreativitas dibentuk menjadi ayaman tikar, topi, ataupun atap rumah. Akan tetapi sekarang sudah agak berkurang dikarenakan kurangnya wadah untuk mereka menjual hasil tersebut sehingga banyak warga yang tidak lagi melakukan kegiatan menganyam tersebut sebagai mata pencaharian utama.

Untuk kondisi anak, di wilayah tersebut sampai saat ini tidak pernah dilaporkan adanya terjadi kekerasan oleh warga. Akan tetapi RT setempat mengatakan bahwa dikarenakan kondisi lingkungan yang sempit dan tidak nyaman bagi anak, serta para orangtua yang sibuk mencari nafkah, anak-anak dibiarkan saja bermain diluar bersama yang lain tanpa adanya pengawasan, sehingga mereka rentan untuk tidak mengetahui jenis-jenis kekerasan apa saja yang dapat terjadi pada mereka.

Sangat mungkin terjadi kekerasan pada anak di lingkungan tersebut, dikarenakan kurangnya perhatian dari setiap orangtua, menjadikan anak tumbuh secara sendiri-sendiri tanpa adanya empati terhadap satu sama lain. Mereka tumbuh dengan cara mereka sendiri dan tidak peduli dengan keadaan sekitar apakah layak atau tidak bagi mereka.

Terdapat 1 (satu) lapangan yang cukup besar yang berada tepat di pinggir sungai musu, yang terlihat jelas jembatan Musi 6 Kota Palembang, dan nantinya di lapangan tersebut akan dijadikan lokasi kegiatan sosialisasi dan advokasi pencegahan kekerasan terhadap anak sebagai aksi perubahan

peserta yang pertama.

Lapangan tersebut cukup besar untuk dijadikan lokasi kegiatan, akan tetapi masih diperlukannya tenda dan kursi untuk kegiatan tersebut mengingat apabila cuaca panas ataupun terjadi hujan maka kegiatan tersebut akan dapat terus berjalan tanpa ada hambatan sedikitpun.

4. Merancang pelaksanaan inovasi kegiatan



Gambar 3.3 melaksanakan diskusi dengan komunitas Relawan Anak Sumatera Selatan dan RT setempat

Setelah melihat kondisi lapangan di wilayah tersebut, tim menyimpulkan bahwa diperlukan tenda, kursi serta alas untuk anak-anak duduk. Selanjutnya tim berkoordinasi dengan RT setempat untuk bersama-sama anak muda disana agar pada saat hari pelaksanaan kegiatan secara penuh membantu untuk memasang tenda yang ada di RT tersebut, menyusun kursi-kursi yang akan digunakan serta menyiapkan meja untuk narasumber acara.

Untuk kesiapan lainnya diperlukan soundsystem agar materi yang disampaikan dapat dengan jelas terdengar oleh anak-anak dan orang tua. Serta pemasangan spanduk di lokasi kegiatan.

5. Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi



Gambar 3.4 melaksanakan sosialisasi dan advokasi

Kegiatan sosialisasi dan advokasi dilaksanakan di Daerah Kampung Anyaman 3-4 Ulu di Kota Palembang. Daerah ini merupakan daerah padat penduduk yang ada di Kota Palembang. Peserta dari kegiatan ini adalah sebanyak 50 (lima puluh) anak binaan dari Relawan Anak Sumatera Selatan berikut orangtuanya. Dinas berinisiasi untuk dapat turut serta membantu memberikan sosialisasi terhadap anak-anak agar dapat terhindar dari kekerasan. Mengingat lokasi tempat tinggal mereka yang berada di lingkungan padat penduduk, sehingga rentan untuk dapat terjadinya kekerasan. Baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan lainnya.

Pada saat pelaksanaan sosialisasi, selain bekerjasama dengan Relawan Anak Sumatera Selatan, dinas mengajak serta juga Lasnaz Mandiri untuk dapat menjadi narasumber dengan menghadirkan boneka fiksi bersama Kak Bebe.

Setelah persiapan dan undangan diberikan kepada peserta dan narasumber, seluruh anggota tim menuju ke lokasi untuk persiapan melakukan kegiatan sosialisasi. Ketua RT setempat mengingatkan lagi warganya agar bersama anak-anak untuk dapat segera menuju lapangan untuk menerima materi dari narasumber. Untuk membuka acara, hadir pejabat dari wilayah tersebut yaitu Lurah 3-4 Ulu Kota Palembang dan Camat

Seberang Ulu I Kota Palembang, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan untuk membuka kegiatan sosialisasi.

Dalam sambutannya Kepala Dinas mengatakan bahwa orangtua berperan penting bagi tumbuh kembang anak. Anak yang tumbuh dengan kasih sayang dan perasaan cinta akan menjadikan anak yang bertanggung jawab baik bagi dirinya maupun keluarga. Perlunya penanaman nilai agama yang baik dalam lingkungan, serta adanya sikap saling memaafkan baik sebagai anak maupun kita sebagai orang tua. Nantinya setelah kegiatan ini selesai dilaksanakan akan ada monitoring baik dari Relawan Anak Sumatera Selatan sebagai mitra kolaborasi maupun dari dinas untuk dapat terus memantau kondisi anak-anak di lingkungan 3-4 Ulu Kota Palembang.

Untuk dapat memaksimalkan pelayanan dinas terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan juga secara resmi menjadikan daerah Kampung Anyaman sebagai tempat PUSPAGA, yakni Pusat Pembelajaran Keluarga, salah satu program pembelajaran yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dimana masyarakat dapat berkonsultasi langsung dengan psikolog yang ada di dinas tentang permasalahan yang di alami anak maupun orang tua di wilayah tersebut.

6. Dukungan stakeholder

Mobilisasi dimaksud untuk mengalang dukungan dan mensosialisasikan gagasan aksi perubahan kepada para stakeholders dilaksanakan selama 1 (satu) minggu dari tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan 27 Mei 2025.



Gambar 3.5 dukungan stakeholder dari bidang perencanaan BAPPEDA Provinsi Sumsel



Gambar 3.6 dukungan stakeholder dari bidang perencanaan BPKAD Provinsi Sumsel

Dalam konteks aksi perubahan, pengembangan kompetensi sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh pihak terdampak, baik peserta, pengelola program, maupun mitra stakeholder, memiliki kemampuan yang relevan dan sesuai. Berikut adalah strategi pengembangan kompetensi yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak terdampak, serta cara untuk mengembangkan kompetensi tersebut.

Dan tidak lupa dukungan penting dari komunitas peduli anak yang terlibat secara langsung, dalam hal ini Relawan Anak Sumatera Selatan. Relawan Anak Sumatera Selatan terbentuk sebagai wadah bagi anak-

anak di Sumatera Selatan untuk berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Sejarah pembentukannya tidak merujuk pada satu peristiwa atau tanggal spesifik, melainkan lebih pada proses tumbuh kembang kesadaran akan pentingnya peran anak dalam pembangunan daerah dan kepedulian terhadap sesama. Serta untuk narasumber mengisi acara Dinas bekerjasama dengan Laznas Yatim Mandiri, mereka mempunyai komunitas pendongeng anak dengan bantuan media boneka, jadi kami mengajak peren serta pendongeng mengisi giat sosialisasi tersebut agar anak-anak lebih tertarik mendengarkannya.

B. Manfaat Aksi Perubahan

Perbaikan kualitas layanan perlindungan anak di suatu wilayah punya manfaat yang luas dan berjangka panjang, tidak hanya bagi negara, tapi terutama buat anak-anak itu sendiri, keluarga, dan masyarakat. Berikut penjelasan ringkas apabila dilaksanakan aksi perubahan:

1. Bagi Organisasi.

- a. Terlaksananya tugas pokok di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan peraturan dan per Undang-undangan.
- b. Mampu memberikan pelayanan cepat dan prima dibidang pencegahan kekerasan terhadap anak sehingga diharapkan dapat menekan angka kekerasan yang terjadi di masyarakat.
- c. Memberikan advokasi kepada anak dan masyarakat mengenai hak-hak nya.
- d. Mempercepat sosialisasi perlindungan terhadap anak langsung ke sasaran.

2. Bagi Anak, Keluarga, Masyarakat dan komunitas.

- a. Anak dapat bisa mengetahui jenis-jenis kekerasan sehingga mereka dapat tumbuh sehat secara fisik maupun mental
- b. Keluarga maupun masyarakat mempunyai kesadaran penuh peduli terhadap anak-anak di lingkungan sekitar, agar tidak mendapat perlakuan kekerasan dari siapapun.
- c. Tergeraknya aksi peduli masyarakat membentuk komunitas yang membuat kegiatan serupa guna memberikan sosialisasi dan advokasi terhadap anak dan keluarga yang tinggal di daerah rentan agar dapat hidup lebih baik dan terhindar dari kekerasan.

C. Implementasi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan

Pencegahan kekerasan pada anak bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, perlu adanya kerjasama yang berkelanjutan antara pemerintah dengan stakeholder terkait, kompetensi kepemimpinan yang paling penting meliputi etika yang kuat, memberdayakan diri sendiri dan orang lain, keterbukaan terhadap ide-ide baru, kehandalan dalam memberi pengaruh, serta berkomunikasi dengan efektif.

Kompetensi kepemimpinan adalah keterampilan dan perilaku kepemimpinan yang berkontribusi pada kinerja yang unggul. Dengan menggunakan pendekatan berbasis kompetensi untuk kepemimpinan, organisasi dapat mengidentifikasi dan mengembangkan generasi pemimpin mereka dengan lebih baik.

Dalam konteks aksi perubahan penguatan kolaborasi antara dinas dengan komunitas peduli anak yang ada di Provinsi Sumatera Selatan sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh pihak terdampak, baik peserta, pengelola program, maupun komunitas terkait, memiliki kemampuan yang relevan dan sesuai dengan perlindungan anak.

BAB IV

KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

Keberlanjutan aksi perubahan merujuk pada kemampuan dan upaya untuk mempertahankan dan melanjutkan tindakan atau program perubahan yang telah dilakukan. Keberlanjutan aksi perubahan menjadi penting karena banyak perubahan yang memerlukan waktu dan konsistensi untuk mencapai dampak yang signifikan. Beberapa aspek yang relevan untuk mencapai keberlanjutan aksi perubahan adalah sebagai berikut:

1. Komitmen penuh dari semua pihak terlibat sangat penting untuk memastikan keberlanjutan aksi perubahan ini termasuk pihak-pihak seperti pemerintah, lembaga non-pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Tanpa komitmen yang kuat, aksi perubahan bisa terhambat atau berhenti begitu saja.
2. Keberlanjutan aksi perubahan memerlukan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan. Sumber dana yang cukup harus dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan yang mendukung perubahan yang diinginkan.
3. Integrasi dalam Kebijakan dan Rencana Jangka Panjang. Aksi perubahan yang berkelanjutan harus terintegrasi dalam kebijakan dan rencana pembangunan jangka panjang. Ini berarti bahwa tujuan, strategi, dan program aksi perubahan harus mencerminkan komitmen dalam rencana pembangunan daerah.
4. Menerapkan Pendekatan Berbasis kolaborasi dengan komunitas peduli anak. Melibatkan pihak eksternal secara aktif dalam aksi perubahan adalah kunci keberlanjutan. Partisipasi komunitas peduli anak memungkinkan mereka merasa memiliki dan berperan aktif dalam proses perubahan, yang akan meningkatkan kemungkinan keberhasilan jangka panjang.
5. Pemantauan dan evaluasi secara teratur diperlukan untuk mengukur kemajuan dan dampak dari aksi perubahan. Dengan memantau kinerja dan hasil, kita dapat mengidentifikasi perubahan yang diperlukan dan membuat penyesuaian jika diperlukan.
6. Beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan tantangan yang muncul adalah kunci untuk keberlanjutan aksi perubahan. Keterbukaan terhadap inovasi dan fleksibilitas dalam mengatasi masalah akan membantu mempertahankan dan meningkatkan efektivitas program.

Keberlanjutan aksi perubahan membutuhkan perhatian yang berkelanjutan, kerjasama yang erat antara pihak-pihak terlibat, dan kemauan untuk beradaptasi dengan perubahan. Dengan demikian, upaya untuk mencapai tujuan perubahan dapat berlangsung secara berkesinambungan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Untuk memastikan keberlanjutan dari aksi perubahan **“Penguatan Kolaborasi Dinas dengan Komunitas di Sumatera Selatan dalam meningkatkan Sistem Perlindungan terhadap Anak” di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan**, telah dirumuskan tahapan jangka menengah dan tahapan jangka panjang, sebagai berikut:

a. Target Jangka Menengah

Terlaksananya sosialisasi dan advokasi kegiatan pencegahan kekerasan pada anak yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2025 di Daerah Kampung Anyaman 3-4 Ulu Palembang. Dengan peserta sebanyak 50 (lima puluh) anak-anak dan orang tuanya masing-masing. Narasumber yang kami hadirkan adalah figur boneka dongeng Kak Bebe yang menarik perhatian anak-anak dengan memberikan materi tentang bahaya nya kekerasan yang dapat terjadi pada anak, dan memberikan motivasi kepada mereka agar dapat menjadi anak yang hebat dan mandiri bebas dari kekerasan.

b. Jangka Panjang (1-2 Tahun)

Kegiatan ini tidak hanya selesai dengan bekerjasama dengan 1 (satu) komunitas saja, akan tetapi akan dilaksanakan kerjasama dengan komunitas lainnya.

Pada tanggal 12 Agustus 2025 mendatang, peserta akan melaksanakan giat bekerjasama dengan FORKESI Sumsel (Forum Keluarga Spesial) yang dimana mereka merupakan anggota dari orang tua/pendamping yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Nanti akan dilaksanakan pelatihan kepada mereka tentang pembelajaran mandiri sebagai orang tua/ pendamping yang memiliki anak berkebutuhan khusus.

BAB V

KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN

Untuk mengimplementasikan aksi perubahan **“Penguatan Kolaborasi Dinas dengan Komunitas di Sumatera Selatan dalam meningkatkan Sistem Perlindungan terhadap Anak”** pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mata pelatihan pilihan yang dapat dipilih oleh peserta aksi perubahan adalah:

Tabel 5.1 Mata pelatihan yang dipilih oleh Peserta Aksi Perubahan

No	Judul aksi perubahan	Mata pelatihan	Jalur pembelajaran	Hubungan dengan aksi pembelajaran	Sumber pembelajaran
	“Penguatan Kolaborasi Dinas dengan Komunitas di Sumatera Selatan dalam meningkatkan Sistem Perlindungan terhadap Anak”	Manajemen Pemerintahan	Mandiri	Proses penting dalam pelaksanaan pemerintahan guna menghasilkan hasil yang efektif dan efisien dengan tetap berintegritas dalam pelaksanaan	Modul
		Menguasai seni berkomunikasi dalam hubungan kerja	Mandiri (ASN BERPIJAR)	Kemampuan interpersonal dalam berkomunikasi berguna untuk membangun hubungan	Mengikuti kelas pelatihan ASN Berpijar

				antar stakeholder agar tercapai tujuan aksi perubahan	
		Membina kerjasama Tim	Mandiri (ASN berpijar)	Menjalin kerjasama yang efektif dalam tim agar berhasil mencapai tujuan aksi perubahan	mengikuti kelas pelatihan ASN Berpijar

1. Manajemen Pemerintahan

Pembelajaran manajemen pemerintahan terkait aksi perubahan mengacu pada proses belajar dan penerapan prinsip-prinsip manajerial dalam konteks pemerintahan, terutama ketika melakukan transformasi atau perbaikan sistem, kebijakan, dan pelayanan publik.

Pembelajaran Manajemen Pemerintahan terkait aksi perubahan dapat mencakup beberapa aspek, seperti:

- a) Pengembangan Kebijakan: Mempelajari bagaimana mengembangkan kebijakan yang efektif untuk mendukung aksi perubahan dalam pemerintahan.
- b) Manajemen Perubahan: Mempelajari bagaimana mengelola perubahan dalam organisasi pemerintahan, termasuk mengelola resistensi dan membangun dukungan.
- c) Kepemimpinan: Mempelajari bagaimana menjadi pemimpin yang efektif dalam menggerakkan aksi perubahan dalam pemerintahan.
- d) Kolaborasi dan Kemitraan: Mempelajari bagaimana membangun kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai stakeholders untuk mendukung aksi perubahan.

- e) Evaluasi dan Pemantauan: Mempelajari bagaimana melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap aksi perubahan untuk memastikan bahwa tujuan yang diinginkan tercapai.

2. Menguasai Seni Berkomunikasi Dalam Hubungan Kerja (ASN BERPIJAR)

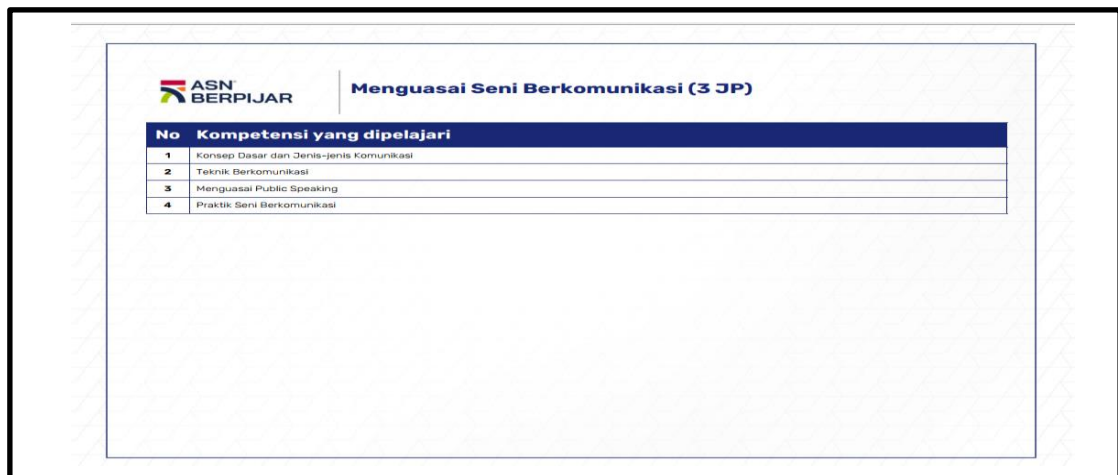
Dalam aksi perubahan ini, komunikasi bukan hanya sebagai alat menyampaikan informasi, tetapi menjadi alat strategis membangun kepercayaan, kolaborasi, dan keberhasilan program pemberdayaan AMPK. Menguasai Seni Berkomunikasi dalam Hubungan Kerja (ASN BERPIJAR) merupakan bagian penting dari peningkatan kompetensi ASN dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Mengapa Keterampilan Berkomunikasi Penting?

- Secara umum, Kemampuan kita berkomunikasi secara efektif adalah kompetensi interpersonal kita (Spitzberg & Cupach, 1989).
- Menentukan efektifitas setiap individu dalam bekerja sama, termasuk proses koordinasi, guna mencapai suatu tujuan.
- Dalam dunia professional, Membantu memahami karakter rekan kerja
- Meningkatkan produktivitas
- Memudahkan penerapan aturan
- Menunjang penyelesaian konflik
- Mempermudah pengambilan keputusan
- Meningkatkan progresi karir

Komunikasi yang efektif dapat mewujudkan beberapa aspek diantaranya :

- Meningkatkan kerjasama antar pegawai dan antar instansi.
- Menghindari salah paham yang bisa memicu konflik.
- Membantu menyampaikan kebijakan, instruksi, dan inovasi dengan tepat.
- Membangun budaya kerja yang sehat dan terbuka.



Gambar 5.1 Foto Sertifikat Menguasai Seni Berkomunikasi

3. Membina Kerjasama Tim (ASN BERPIJAR)

Membina Kerjasama Tim (ASN BERPIJAR) adalah bagian penting dalam penguatan kompetensi ASN (Aparatur Sipil Negara), khususnya dalam mewujudkan budaya kerja kolaboratif yang produktif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam aksi perubahan seperti **“Penguatan Kolaborasi Dinas dengan Komunitas di Sumatera Selatan dalam meningkatkan Sistem Perlindungan terhadap Anak”**, kerjasama tim menjadi kunci:

- Koordinasi antara Dinas dan stakeholder komunitas peduli anak dan instansi pendukung.

- Pembagian peran antara pengelola program dan pembimbing teknis.
- Penyusunan SOP bersama untuk mendukung kelancaran magang.

Membina kerjasama tim bukan sekadar bekerja bersama, tetapi bekerja dengan sinergi dan komitmen bersama untuk pelayanan publik yang unggul. ASN yang mampu membangun dan menjaga kolaborasi dalam tim adalah aset penting dalam transformasi birokrasi yang berdampak nyata.

Tujuan Pembinaan Kerjasama Tim bagi ASN adalah :

1. **Meningkatkan efektivitas kerja** melalui sinergi antar anggota tim.
2. **Mengurangi konflik** akibat miskomunikasi atau ego sektoral.
3. **Mendorong inovasi dan solusi kreatif** melalui pemikiran kolektif.
4. **Membangun kepercayaan antar ASN**, yang memperkuat pelayanan publik.



Gambar 5.2 Foto Sertifikat Membina Kerjasama Tim

BAB VI

DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

Diseminasi Merupakan proses penyebarluasan informasi, pengetahuan, atau hasil dari suatu aksi perubahan kepada pihak-pihak terkait (stakeholder) agar mereka memahami, menerima, dan menerapkan hasil perubahan tersebut. **Publikasi** adalah proses memperkenalkan atau menginformasikan hasil aksi perubahan kepada khalayak luas melalui berbagai media, baik internal maupun eksternal (cetak, digital, media sosial, seminar, konferensi, dan lain-lain).

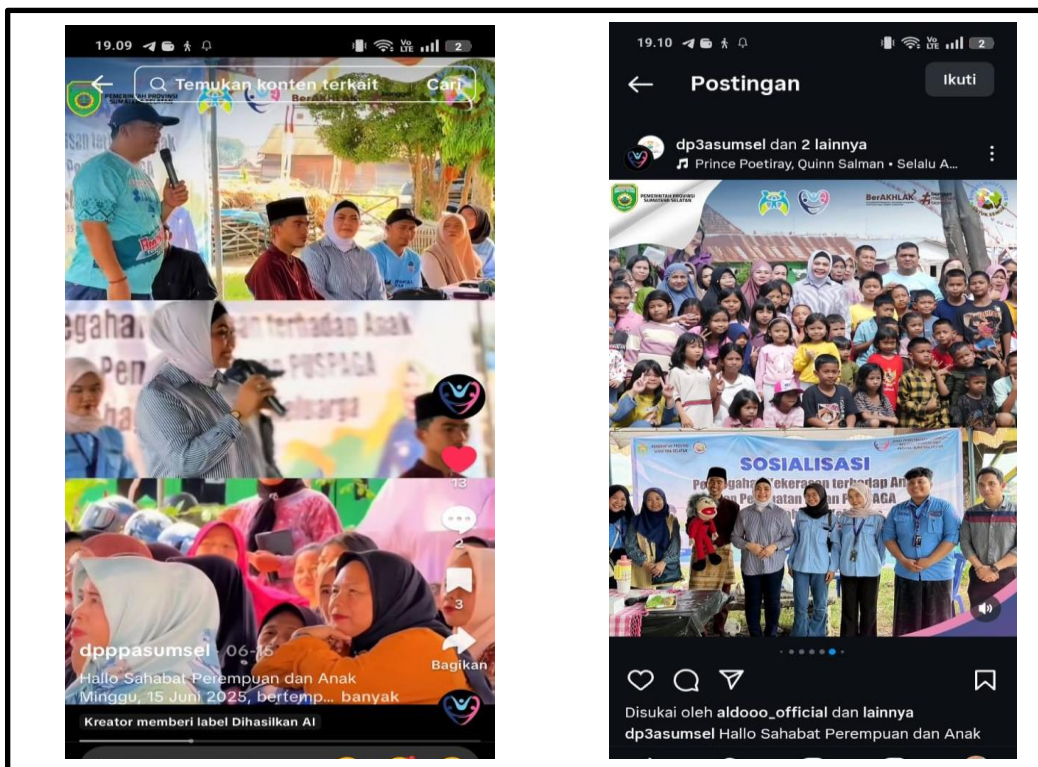
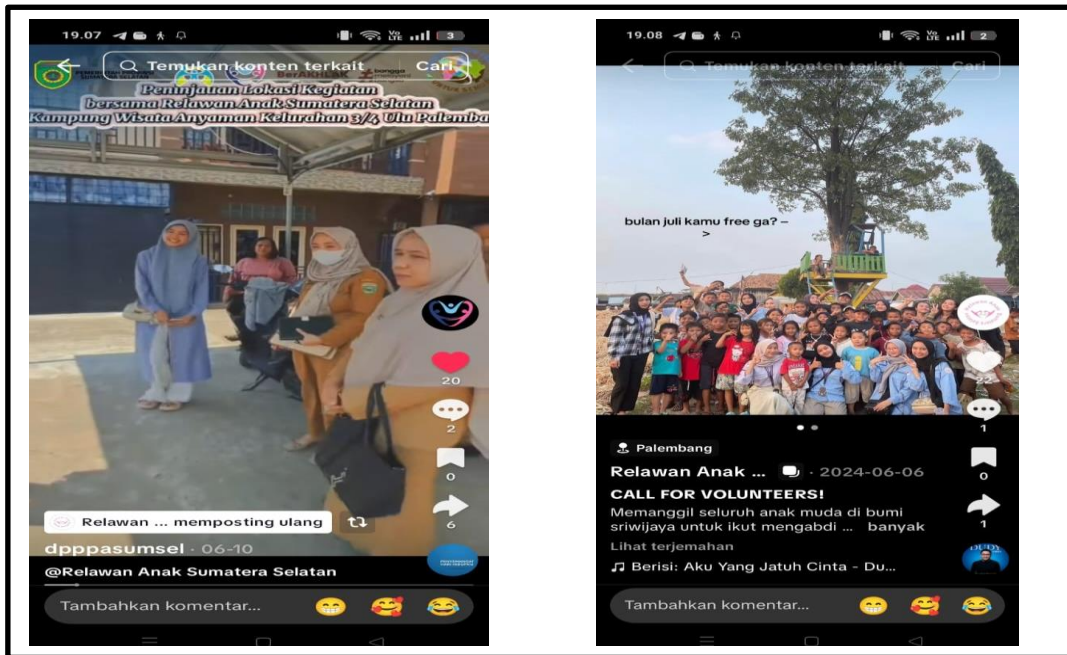
Diseminasi dan Publikasi Aksi Perubahan merupakan tahap penting dalam siklus manajemen perubahan, khususnya dalam konteks pelaksanaan program peningkatan kinerja, reformasi birokrasi, atau inovasi di sektor publik maupun swasta.

A. Penerapan Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi adalah pendekatan sistematis untuk menyampaikan pesan kepada target audiens dengan tujuan menciptakan pemahaman bersama, menumbuhkan dukungan, serta mendorong partisipasi dalam pelaksanaan aksi perubahan. Penerapan Strategi Komunikasi dalam konteks aksi perubahan sangat penting untuk memastikan bahwa proses perubahan dapat diterima, dipahami, dan diadopsi secara efektif oleh semua pihak yang terlibat.

Pada tahapan penerapan strategi komunikasi dalam Diseminasi dan Publikasi Aksi Perubahan, Projek Leader mengembangkan strategi yang modern berbasis media social diantaranya :

- [Instagram Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan](#)
- [Tiktok](#) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
- Instagram Lasnaz Yatim Mandiri
- Tiktok Relawan Anak Sumatera Selatan



Gambar 6.1 Media Sosial Dinas dan Stakeholder

B. Keberhasilan Mendapat Dukungan Aksi Perubahan

Keberhasilan mendapatkan dukungan aksi perubahan mencerminkan tingkat penerimaan, partisipasi, dan keterlibatan aktif dari para pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap program perubahan yang dilaksanakan. Dukungan ini sangat krusial untuk memastikan kelangsungan dan efektivitas dari aksi perubahan. Dukungan terhadap aksi perubahan merupakan fondasi penting dalam memastikan perubahan berjalan efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan meraih dukungan menunjukkan bahwa aksi perubahan bukan hanya inisiatif individu, tetapi telah menjadi gerakan bersama dalam organisasi.

BAB VII

PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Strategi Pengembangan

Strategi pengembangan potensi diri ini bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas seluruh pihak yang terlibat dalam aksi perubahan dengan judul **“Penguatan Kolaborasi Dinas dengan Komunitas di Sumatera Selatan dalam meningkatkan Sistem Perlindungan terhadap Anak”**. Pengembangan potensi diri yang terencana dan terstruktur akan mendukung pelaksanaan aksi perubahan dengan lebih efektif.

Setelah dilakukan identifikasi hasil asesment nilai akhir gabungan nilai perilaku peserta dan mentor dalam pengembangan potensi diri dalam aksi perubahan, ditemukan beberapa nilai kecil peserta yang menjadi fokus pengoptimalan diantaranya :

- 1) Komponen Kerjasama /Sub Komponen Kerjasama Eksternal
- 2) Komponen Kerjasama/ Sub Komponen Komunikasi,
- 3) Komponen Mengelola Perubahan /Sub Komponen Adaptabilitas.

Tabel 7.1 Komponen Pengembangan Diri

No	Komponen / sub Komponen	Kegiatan Pengembangan Diri untuk mendukung Pelaksanaan Aksi Perubahan	Kegiatan/ Tahapan Aksi Perubahan	Waktu Pelaksanaan		Hasil
				Rencana	Realisasi	
1	Kerjasama/ Kerjasama Eksternal	Membentuk kerja sama dengan Komunitas Peduli Anak	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memilih komunitas untuk kolaborasi ➤ Membuat kesepakatan 	Mei 2025	5 s.d 9 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Daftar hadir ➤ dokumentasi
2	Kerjasama/ Komunikasi	Sosialisasi tentang pencegahan	Melaksanakan sosialisasi di Kampung	Juni 2025	15 Juni 2025	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kegiatan ➤ Dokumentasi

		kekerasan terhadap anak	Anyaman 3-4 Ulu Palembang			➤ Daftar hadir
3	Pengelolaan Perubahan / Adaptibilitas	Peninjauan lokasi dan monitoring hasil	Melaksanakan peninjauan ulang setelah pelaksanaan kegiatan	Juni 2025	20 Juni 2025	➤ Peninjauan ulang ➤ Dokumentasi

1. Komponen Kerjasama / Sub Komponen Kerjasama Eksternal

Kerjasama eksternal adalah proses kerjasama antara individu atau organisasi dengan pihak luar, seperti organisasi lain, lembaga, atau individu, untuk mencapai tujuan bersama dan meningkatkan efektivitas dalam melaksanakan aksi perubahan. Tujuan kerjasama eksternal adalah untuk meningkatkan sumber daya, meningkatkan inovasi, dan meningkatkan efektivitas dalam melaksanakan aksi perubahan. Dengan kerjasama eksternal yang efektif, individu atau organisasi dapat mencapai tujuan yang lebih besar dan meningkatkan dampak positif bagi masyarakat.

Dalam aksi perubahan kemampuan interpersonal menjalin kerjasama yang baik dan efektif sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan dalam membangun hubungan kerjasama guna mencapai tujuan utama perubahan.

- 1). Kerjasama dengan Relawan Anak Sumatera Selatan guna melaksanakan sosialisasi dan advokasi kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak

Komponen Kerjasama / Sub Komunikasi

Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, gagasan, atau pesan antara individu atau kelompok melalui berbagai cara, seperti verbal, non-verbal, atau tertulis. Dalam aksi perubahan kemampuan interpersonal dalam komunikasi yang efektif sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pribadi, profesional, dan sosial terutama membangun hubungan guna mencapai tujuan utama perubahan.

Komunikasi efektif melibatkan beberapa hal yang berhubungan diantaranya:

- Pengiriman pesan yang jelas dan tepat.
- Penerimaan pesan yang akurat dan mudah dipahami.
- Adanya umpan balik yang konstruktif untuk memastikan pemahaman yang sama.

Adapun tujuan komunikasi diantaranya :

- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran.
- Membangun hubungan dan kerjasam.
- Mengatasi masalah dan konflik.
- Meningkatkan efektivitas dan produktivitas.

3. Komponen Mengelolah Perubahan / Komponen Adaptibilitas

Adaptibilitas adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, situasi, atau lingkungan yang baru atau tidak terduga. Adaptibilitas melibatkan kemampuan interpersonal dalam menghadapi perubahan dengan fleksibel, menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tuntutan yang baru, mengembangkan strategi dan solusi untuk mengatasi tantangan, meningkatkan kemampuan dan keterampilan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga.

Adaptibilitas sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan diantaranya karir dan pekerjaan, pendidikan dan pembelajaran, hubungan sosial dan pribadi, menghadapi perubahan dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memiliki kemampuan adaptibilitas yang baik, individu dapat meningkatkan kemampuan untuk menghadapi perubahan dan tantangan, serta meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam berbagai aspek kehidupan.

pengembangan kemampuan adaptibilitas sangat diperlukan dalam aksi perubahan karena seringkali aksi perubahan yang dilaksanakan tidak berjalan sesuai rencana yang telah disusun dan dibutuhkan kemampuan untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan situasi.

Dalam rangka mencapai tujuan perubahan, pengembangan potensi diri dalam tiga fokus tersebut menjadi sangat penting dan harus terus

dioptimalkan. Hal-hal ini akan membantu individu dan tim untuk mampu beradaptasi dan menghadapi tantangan dalam aksi perubahan.

Peninjauan ulang/ monitoring hasil kegiatan dilaksanakan 1 (satu) minggu setelah selesai sosialisasi dan advokasi dilakukan



Gambar 7.1 Monitoring Hasil Sosialisasi dan Advokasi

BAB VIII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Melalui Aksi Perubahan ini *project leader* telah mampu menunjukkan kompetensi kepemimpinannya dalam membangun integritas dan budaya pelayanan yang bermutu, yaitu :

1. Mengaktualisasikan Kepemimpinan Pancasila dan Semangat Bela Negara. *Project leader* mengaktualisasikan kepemimpinan pancasila dan semangat bela negara dengan melakukan terobosan inovasi secara berintegritas, yaitu tanggung jawab, komitmen, disiplin, jujur, konsisten dan pengambilan Keputusan secara demokrasi. *Project leader* berperan sebagai *role model* dan agen perubahan dalam membangun budaya integritas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
2. Mengaktualisasikan Kepemimpinan Melayani. *Project leader* telah mengidentifikasi adanya area tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yang belum optimal, yaitu masih sedikitnya sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang ada, sehingga muncullah inovasi untuk melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai komunitas peduli anak yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Aksi perubahan ini telah berhasil dilaksanakan dengan tujuan utama untuk memperluas jangkauan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang berada di daerah rentan kekerasan. Pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa:
 - a) **Kolaborasi dengan komunitas peduli anak** secara signifikan memperluas jangkauan dinas dalam menentukan target anak yang tinggal di daerah rentan kekerasan.
 - b) **Kolaborasi dengan komunitas peduli anak** terbukti efektif dalam memetakan berbagai permasalahan yang dihadapi anak-anak di masing-masing wilayah

- c) **Target sasaran lebih tepat mengenai anak-anak secara langsung.**
- d) **Program ini layak untuk direplikasi dan dikembangkan** lebih luas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu strategi perlindungan terhadap anak.

Dengan demikian, aksi perubahan ini bukan hanya melindungi anak-anak dari kekerasan, tetapi juga menjadi langkah awal dalam menciptakan peluang kehidupan yang lebih baik bagi mereka di masa depan.

B. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan dari aksi perubahan ini adalah perlunya dukungan dan komitmen bersama dari semua stakeholders diantaranya :

- a) Penguatan Kemitraan Berkelanjutan.
- b) Integrasi Program ke dalam Kebijakan Tetap.
- c) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung.
- d) Monitoring dan Evaluasi Berkala.

Dengan dukungan dan komitmen bersama ini, pelaksanaan aksi perubahan dalam tahapan berikutnya akan mudah terealisasi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.1254 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 314004 Faksimile : (0711) 314004 Kode Pos 30126
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fitriana, S.Sos, M.Si
NIP : 196903281989082002
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja/Instansi : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Sumatera Selatan

Dengan ini mendukung penuh Keberlanjutan Aksi Perubahan yang digagas oleh :

Nama : Bariyanti Arthini, S.E, M.Si
NIP : 198112062006042016
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak
Unit Kerja/Instansi : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Sumatera Selatan
Judul : Penguatan Kolaborasi Dinas dengan Komunitas di Provinsi
Sumatera Selatan Guna Meningkatkan Sistem Perlindungan Anak

Yang dilaksanakan dari Tanggal 08 Mei s.d 07 Juli 2025 pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian Pernyataan Dukungan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 1 Juli 2025

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

FITRIANA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 196903281989082002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Kapten A.Rivai Nomor 51 Palembang, Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 7443621 No.Faximile (0711) 7443621
Laman bpkad.sumselprov.go.id, Pos-el bpkad@sumselprov.go.di

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUPRI ANTHONY,S.E
NIP : 197811272009021002
Jabatan : Plh. Kepala Bidang Anggaran BPKAD
Unit Kerja/Instansi : BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

Dengan ini mendukung penuh Keberlanjutan Aksi Perubahan yang digagas oleh :

Nama : BARIYANTI ARTHINI,S.E.,M.Si
NIP : 198112062006042016
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
Unit Kerja/Instansi : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
Judul : Penguatan Kolaborasi Dinas dengan Komunitas di Sumatera Selatan dalam meningkatkan Sistem Perlindungan terhadap Anak

Yang diselenggarakan untuk Angkatan I pada bulan April s.d Juli tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian Pernyataan Dukungan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 2025
Plh. Kepala Bidang Anggaran BPKAD,

SUPRI ANTHONY,S.E
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 197811272009021002



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jln. Kapten A. Rivai No. 23 Palembang Telp. (0711) 356018-356118 Faximile 321181-356118
Website:www.bappedasumsel.go.id, email:

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MERY ANA,S.E.,M.Si
NIP : 198112072009012006
Jabatan : Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Unit Kerja/Instansi : BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan

Dengan ini mendukung penuh Keberlanjutan Aksi Perubahan yang digagas oleh :

Nama : BARIYANTI ARTHINI,S.E.,M.Si
NIP : 198112062006042016
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
Unit Kerja/Instansi : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
Judul : Penguatan Kolaborasi Dinas dengan Komunitas di Sumatera Selatan dalam meningkatkan Sistem Perlindungan terhadap Anak

Yang diselenggarakan untuk Angkatan I pada bulan April s.d Juli tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian Pernyataan Dukungan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 2025
Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan ,



MERY ANA,S.E.,M.Si
Pembina (IV.a)
NIP. 198112072009012006



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Ade Irma Suryani Nasution Nomor 1254 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 314004 Faximile : (0711) 314004 Kode Pos 30126

Palembang, 5 Juni 2025

Nomor : 065 / 279 /PPA/DPP-PA/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan Pelaksanaan Kegiatan

Yth.
Ketua Relawan Anak Sumatera Selatan

Di
Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Sosialisasi pada sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan akan mengadakan kegiatan dengan tema "Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan Penguatan Peran PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dengan pada :

Hari / Tanggal : Minggu / 15 Juni 2025
Waktu : 09.30 WIB s.d Selesai
Tempat : Kampung Wisata Anyaman
Lorong Prajurit Nangyu Kelurahan 3/4 Ulu Palembang

Untuk itu diharapkan kepada Saudara mengajak anak-anak binaan di daerah tersebut sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dan orang tua/wali sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang pada jadwal dimaksud. Konfirmasi dapat menghubungi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, Kasi Perlindungan Khusus Anak Sdri. Bariyanti Arthini, S.E., M.Si (Wa. 0812-7831-593)

Demikian surat undangan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KEPALA DINAS,
FITRIANA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 196903281989082002

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dan Penguatan Peran PUSPAGA sebagai Sahabat Keluarga
Bersama Relawan Anak Sumatera Selatan
Tanggal 15 Juni 2025 di Kampung Wisata Anyaman Palembang

WAKTU (WIB)	KEGIATAN	NARASUMBER / FASILITATOR
07.30 - 08.00	Registrasi Peserta	Panitia
08.00 - 08.30	Pembukaan Acara : 1 Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 2 Laporan Ketua Panitia 3 Sambutan Ketua Relawan Anak Sumsel 4 Sambutan Kadis sekaligus membuka acara 5 Do'a 6 Foto bersama	Panitia Panitia Relawan Anak Sumsel DPPPA Prov. Sumsel Panitia
08.30 - 09.30	Materi 1 : Pola Asuh Keluarga yang Baik untuk Menjadikan Anak Hebat dan Mandiri	LAZNAZ Yatim Mandiri Palembang
09.30 - 09.45	COFFEE BREAK	
09.45 - 11.45	Materi 2 : Pola Asuh Keluarga yang Baik untuk Menjadikan Anak Hebat dan Mandiri	LAZNAZ Yatim Mandiri Palembang
11.45 - 12.45	Materi 3 : Peran DPPPA Sumsel dalam Perlindungan Anak yang hidup di lingkungan rentan kekerasan	DPPPA Prov. Sumsel
12.45 -13.45	ISHOMA	
13.45 - 14.45	Materi 3 : Pengenalan Relawan Anak Sumsel dan Anak-anak Binaan	Relawan Anak Sumsel
14.45 - 15.45	Materi 4 : Pencegahan terhadap Hal-hal Buruk di Lingkungan	DPPPA Prov. Sumsel
15.45 - 16.00	COFFEE BREAK	
16.00 - 16.15	PENUTUP	

catatan : Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah tanpa konfirmasi terlebih dahulu

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN,


FITRIANA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 196903281989082002

DAFTAR HADIR PESERTA
KEGIATAN SOSIALISASI BERSAMA RELAWAN ANAK SUMATERA SELATAN

HARI / TANGGAL : MINGGU / 15 JUNI 2025
 TEMPAT : KAMPUNG WISATA ANYAMAN PALEMBANG

No.	Nama	Uraian	Tanda Tangan
1	Sakinah		Sakinah
2	M. HAİKAL.		Haikal
3	M. Pika Romashon		Pika
4	KMS AIF ALPA ROZI		AIF
5	IWAN		Iwan
6	ARYA		Arya
7	FALIH		Falih
8	M. PAKAR		Pakar
9	M. ALWI		Alwi
10	ADI		Adi
11	UDIK		Udik
12	P. DAL		Dal
13	OPI		Opi
14	SANTI		Santi
15	Mandala		Mandala
16	Nabilah		Nabilah
17	ANISAH		Anisah
18	AINDAN		Aindan
19	RIRIP		Ririp
20	RIZA		Riza

No.	Nama	Uraian	Tanda Tangan
21	Lidya		Lidya
22	Tiwik		Tiwik
23	RAFI		Rafi
24	REZZA		Rezza
25	MELI		Meli
26	JUSA		Jusa
27	Salma		Salma
28	ANIANITA		Ananita
29	LISTA		Lista
30	RINI		Rini
31	IRMA SURYANI		Irm
32	PUTRI		Putri
33	MIRA		Mira
34	ELIYA		Eliya
35	NIZAM		Nizam
36	MINA		Mina
37	WATI		Wati
38	RANI		Rani
39	ARETA		Ar
40	NURUL		Nur

No.	Nama	Uraian	Tanda Tangan
41	GITA		gita
42	Sulthan		Sul
43	Ratna		Ratna
44	Falib		Falib
45	Arya		Arya
46	Fitri		Fitri
47	TARA		TARA
48	Novi		Novi
49	Nur		Nur
50	Baru		Baru
51	Hafiz		Hafiz
52	LISA		LISA
53	Sopiah /		Sopiah
54	Rara anak		Rara
55	NURHAYATI		Nurhayati
56	RIKA		Rika
57	Soni		Soni
58	Nurma		Nurma
59	ADIBA		Adiba

No.	Nama	Uraian	Tanda Tangan
60	Hasanah		Hasanah
61	ANITA		Anita
62	Maryati		Maryati
63	Fitriani		Fitriani
64	Musyabikah		Musyabikah
65	Sari Desinopritu Sari		Sari
66	Wildan		Wildan
67	Ecti		Ecti
68	Gita		Gita
69	Tesa		Tesa
70	Jelly Ernani		Jelly Ernani
71	Demi		Demi
72	Rausa		Rausa
73	Hessiyah		Hessiyah
74	KAY		KAY
75	KEN		KEN
76	Bipra		Bipra
77	LTA		LTA
78	TIA		TIA
79	SEL		SEL
80	Putri		Putri

No.	Nama	Uraian	Tanda Tangan
81	FAIBA		FA
82	MIRZA		Mirza
83	ARSYILA		Ar
84	ANNASYA		Ann
85	ARASH		Ar
86	Ami		A
87	Dayati		Day
88	Lida		Lida
89	Dayati		Day
90	PATRIYAH		Pat
91	MARBIYAH		Mar
92	Nursiah		Nur
93	Safana		Safa
94	Daus		Daus
95	ROGLAINI		Rog
96	SAROMA		Sar
97	Yuyun /		Yuy
98	Kelvin pralama		
99	DEWI		Dew
100	KHALISA		Khal



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Ade Irma Suryani Nasution Nomor 1254 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 314004 Faximile : (0711) 314004 Kode Pos 30126

Palembang, 5 Juni 2025

Nomor : 005 / 279 / PPA/DPP-PA/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan Menjadi Narasumber

Yth.
Sdr. Seto Yullyarmawan
Kepala Cabang LAZNAZ Yatim Mandiri Palembang

Di
Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Sosialisasi pada sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi, dengan ini kami mengajukan permohonan kepada Saudara agar dapat menjadi Narasumber pada kegiatan dimaksud. Adapun pelaksanaannya nanti dimohon bantuannya untuk melakukan giat dongeng untuk anak-anak yang akan diadakan pada :

Hari / Tanggal : Minggu / 15 Juni 2025
Waktu : 08.30 WIB s.d 12.00 WIB
Tempat : Kampung Wisata Anyaman
Lorong Prajurit Nangyu Kelurahan 3/4 Ulu Palembang
Tema Dongeng : Pola Asuh Keluarga yang Baik untuk Menjadikan Anak Hebat dan Mandiri

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.


KEPALA DINAS,
FITRIANA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 196903281989082002



Hari / Tanggal : Sabtu / 15 Juni 2025
Tempat : Kampung Anyaman 3/4 Ulu Palembang
Acara : Sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak dan Penguatan Peran PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) Sebagai Sahabat Keluarga



Pelaksanaan Kegiatan

- 1 Acara dibuka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Fitriana, S.Sos., M.Si. Dihadiri oleh Camat Seberang Ulu I, Bapak M. Hürun, S.STP dan Lurah 34 Ulu, Bapak Rama Fitri beserta Ketua RT 04, Bapak Taufik Hidayat dan Ketua RW 02, Bapak Aminudin.
- 2 Kegiatan ini menghadirkan narasumber seorang pendongeng anak dari Laznaz Yatim Mandiri Palembang, yang menyampaikan pesan-pesan penting tentang perlindungan anak dan nilai-nilai pengasuhan positif melalui media dongeng.
- 3 Peserta terdiri dari 35 (tiga puluh lima) orang anak-anak dan 35 (tiga puluh lima) orang tua.
- 4 Acara ini terselenggara atas kerja sama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dengan Relawan Anak Sumatera Selatan, sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan yang ramah anak dan mendukung peran keluarga sebagai perindung utama.
- 5 Melalui kegiatan ini, Masyarakat Kampung Anyaman diharapkan semakin sadar dan peduli terhadap isu kekerasan terhadap anak serta dapat memanfaatkan layanan PUSPAGA sebagai mitra strategis dan sahabat keluarga dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis, ramah anak dan bebas dari kekerasan.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 54 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 314004 Faksimile : (0711) 314004 Kode Pos : 3026

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 021 / KPTS / DPPPA / 2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM KERJA EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN
PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan kegiatan Rancangan Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, dipandang perlu untuk menunjuk Anggota Tim Efektif.
 - b. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Tim Kerja;
 - c. Bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1817);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil;
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kearsipan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

MEMPERHATIKAN : Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Nomor : 890 / 0723 / BPSDMD / V /2025 Tanggal 25 Februari 2025 Hal Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Penunjukan Tim Kerja Efektif Proyek Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Untuk Membantu Pelaksanaan Kegiatan Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Angkatan I Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;

KESATU : Menetapkan dan mengugaskan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai

KEDUA

anggota Tim Efektif Aksi Perubahan pada kegiatan Penguatan Kolaborasi Dinas Dengan Komunitas di Sumatera Selatan Dalam Meningkatkan Sistem Perlindungan Terhadap Anak.

Tugas dan Tanggung Jawab masing-masing sbb:

1. Pengasuh (*Mentor*)

Memberikan arahan penyusunan Tim Efektif dan pelaksanaan aksi perubahan.

2. Ketua Tim

Melaksanakan arahan dari Pengasuh (*Mentor*) dalam rangka pelaksanaan aksi perubahan.

3. Anggota Tim

Membantu Ketua Tim dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan aksi perubahan .

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Mei 2025 s/d 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : Palembang

PADA TANGGAL : 14 Mei 2025

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



FITRIANA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 196903281989082002

Tembusan:

Yang bersangkutan dalam lampiran Keputusan ini;



